



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BPSPL
DENPASAR

26 KRKP



LAPORAN KINERJA

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir
dan Laut Denpasar

Tahun 2025



**BPSPL
DENPASAR**
#BijakMengelolaLaut





TIM PENYUSUN

PENGARAH

Getreda Melsina Hehanussa

PENYUSUN

A. Bobby Yefry Adi Rianto

Faizal Tuhulele

Suci Kusumastuti Nur Azizah

Dewi Setyaningsih

KONTRIBUTOR

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan
Laut Denpasar



BPSPL
DENPASAR

Wahana
Berakhlak
Karakter

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL.....v

DAFTAR GRAFIK..... vi

DAFTAR GAMBAR vii

KATA PENGANTAR viii

RINGKASAN EKSEKUTIF ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan..... 1

1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi..... 2

1.4 Organisasi..... 4

1.5 Kepegawaian..... 6

1.6 Potensi 9

1.7 Permasalahan dan Tantangan..... 14

1.8 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian..... 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 19

2.1 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 – 2029 19

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 20

2.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2025 23

2.4 Keselarasan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 – 2029, Rencana Kerja 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 26

3.2 Kinerja Anggaran..... 29

3.3 Evaluasi atas Capaian Kinerja Tahun 2025..... 33

IK 1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi) 33

IK 2. Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang) 49

IK 3. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) 51

IK 4. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai).....	63
IK 5. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen).....	65
IK 6. IK. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen).....	69
IK 7. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	76
IK 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) ..	80
IK 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	82
IK 10. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	86
IK 11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	88
IK 12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)	90
IK 13. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar(%)	91
IK 14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	92
IK 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	94
IK 16. Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%).....	96
IK 17. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai).....	98
3.4 Tindak Lanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2025	101
3.5 Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain.....	102
BAB IV PRESTASI DAN KINERJA LAINNYA	106
BAB V PENUTUP	111
5.1 Kesimpulan.....	111
5.2 Rekomendasi.....	112
5.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Sebelumnya	112
LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja.....	5
Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia	10
Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.....	11
Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	11
Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	12
Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2025	21
Tabel 7. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2025	26
Tabel 8. Realisasi Anggaran BPSPL Denpasar Tahun 2025	31
Tabel 9. Capaian IK 1 BPSPL Denpasar.....	33
Tabel 10. Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	36
Tabel 11. Sarana dan Prasarana untuk Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	42
Tabel 12. Capaian IK 2 BPSPL Denpasar	49
Tabel 13. Capaian IK 3 BPSPL Denpasar	52
Tabel 14. Dokumentasi IK Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	60
Tabel 15. Capaian IK 5 BPSPL Denpasar	63
Tabel 16. Dokumen Angkut Terbit Tahun 2025	64
Tabel 17. Capaian IK 5 BPSPL Denpasar	66
Tabel 18. Capaian IK 4 BPSPL Denpasar	69
Tabel 19. Pelaksanaan Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	72
Tabel 20. Dokumentasi Kegiatan Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	73
Tabel 21. Dokumentasi Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	74
Tabel 22. Capaian IK 6 BPSPL Denpasar	78
Tabel 23. Capaian IK 7 BPSPL Denpasar	81
Tabel 24. Capaian IK 8 BPSPL Denpasar	85
Tabel 25. Capaian IK 9 BPSPL Denpasar	87
Tabel 26. Capaian IK 11 BPSPL Denpasar	88
Tabel 27. Capaian IK 12 BPSPL Denpasar	90
Tabel 28. Capaian IK 13 BPSPL Denpasar	92
Tabel 29. Capaian IK 14 BPSPL Denpasar	93
Tabel 30. Capaian IK 15 BPSPL Denpasar	96
Tabel 31. Capaian IK 16 BPSPL Denpasar	97
Tabel 32. Capaian IK 17 BPSPL Denpasar	100
Tabel 33 . Media Publikasi BPSPL Denpasar	101
Tabel 34. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2025	102

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Status Pegawai BPSPL Denpasar TA 2025 6

Grafik 2. Perincian PPPK BPSPL Denpasar TA 2025 7

Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan ASN BPSPL Denpasar TA 20257

Grafik 4. Tingkat Pendidikan ASN BPSPL Denpasar TA 2025..... 8

Grafik 5. Distribusi SDM BPSPL Denpasar TA 2025..... 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPSPL Denpasar.....	5
Gambar 2. NPSS BPSPL Denpasar.....	26
Gambar 3. Lokasi Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor.....	35
Gambar 4. Rute Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor.....	38
Gambar 5. Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Alor.....	40
Gambar 6. Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi.....	51
Gambar 7. Dokumen SAJI DN Hiu dan Pari Terbit Tahun 2025.....	53
Gambar 8. Perdagangan Hiu BPSPL Denpasar Tahun 2025	53
Gambar 9. Perdagangan Pari BPSPL Denpasar Tahun 2025.....	54
Gambar 10. Dokumen SAJI DN Banggai Cardinal Fish Terbit Tahun 2025.....	54
Gambar 11. Dokumen Rekomendasi DN Teripang Terbit Tahun 2025	55
Gambar 12. Dokumen Rekomendasi LN Teripang Terbit Tahun 2025	55
Gambar 13. Dokumen Rekomendasi SAA Terbit Tahun 2025	56
Gambar 14. Dokumen Rekomendasi SAA Terbit Tahun 2025	56
Gambar 15. Dokumen SAJI DN Arwana Terbit Tahun 2025	57
Gambar 16. Dokumen SAJI DN Sidat Terbit Tahun 2025.....	57
Gambar 17. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	59
Gambar 18. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat BPSPL Denpasar Tahun 2025	65
Gambar 19. Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.....	69
Gambar 20. Kegiatan Verifikasi Penilaian Teknis Permohonan KKPRL oleh BPSPL Denpasar Tahun 2025.....	71
Gambar 21. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian KKPRL BPSPL Denpasar Tahun 2025.....	71

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan rahmatNya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Denpasar Tahun 2025 yang mendokumentasikan secara singkat mengenai gerak langkah dan kontribusi BPSPL Denpasar selama Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan gambaran dan informasi tentang capaian program dan kegiatan BPSPL Denpasar selama Tahun 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Denpasar dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian atas terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Denpasar.

Gianyar, 31 Desember 2025

Kepala BPSPL Denpasar



Getreda Melsina Hehanussa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada Laporan Kinerja (LKj) tahun 2025 ini telah mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja BPSPL Denpasar tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Pada pelaporan LKj tahun 2025, data capaian dan target BPSPL Denpasar telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder bit.ly/SAKIPDJPKRL serta sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP No. 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) yang dapat diukur pada tahun 2025 adalah sebagai berikut IK 1 Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi) target 1 provinsi dan capaian 1 provinsi; IK 2 Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang) target 30 orang tercapai 30 orang; IK 3 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) target 5 jenis dan

capaian 7 jenis; IK 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai) target 80 dan capaian 90; IK 5 Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) target 1 dokumen dan capaian 1 dokumen; IK 6 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) target 2 dokumen dan capaian 2 dokumen; IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) target 70 dan capaian 86,90; IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) target 89 dan capaian 94,11; IK 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) target 71,5 dan capaian 97,86; IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) dengan target 4 dokumen dan capaian 4 dokumen; IK 11 Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks) target 80 dan capaian 86,85; IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) dengan target 95 dan capaian 87; IK 13 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%) dengan target 100 dan capaian 100; IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 75 dan capaian 87,57; IK 15 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 80 dan capaian 86,11; IK 16 Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar (%) dengan target 76 dan capaian 100; IK 17 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 91 dan capaian 100.

Pagu awal BPSPL Denpasar tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp20.627.700.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp12.012.700.000,-, PNBPN Rp2.075.000.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp6.540.000.000,-. Pada Bulan Februari Tahun 2025, terdapat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi pada anggaran dibawah pengelolanya. Setelah dilakukan revisi DIPA efisiensi anggaran pada tanggal 23 Februari 2025, pagu anggaran BPSPL Denpasar sebesar Rp20.627.700.000,- dengan jumlah dana yang diblokir sebesar Rp4.523.858.000,- yang terdiri dari belanja

barang (52) Rp 4.499.358.000,- dan belanja modal (53) Rp24.500.000,-. Pada Triwulan II terdapat pengesahan revisi DIPA berupa penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA dalam rangka buka blokir anggaran kode 2 pada sumber dana PNBP sebesar Rp. 2.075.000.000,- sesuai surat dari Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan nomor S-531/AG/AG.3/2025 tanggal 17 Juni 2025. Adapun anggaran belum dapat digunakan dikarenakan masih menunggu persetujuan penetapan Maksimum Pencairan PNBP dari Kementerian Keuangan. Triwulan III dilaksanakan reviu rekomposisi usulan tambahan izin penggunaan PNBP Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025. Rekomposisi ini dilaksanakan karena adanya penambahan anggaran sumber dana PNBP Tahun Anggaran 2025 yang semula Rp1.200.000.000,- menjadi Rp11.650.000.000,-. Pada Triwulan IV dilakukan sebelas kali revisi anggaran meliputi satu kali revisi halaman III DIPA, lima kali revisi pemutakhiran KPA, dua kali revisi Satker/POK, satu kali revisi DIPA kewenangan Kanwil, satu kali revisi penambahan pagu sumber dana PNBP, dan satu kali revisi DIPA relaksasi anggaran. Pada triwulan ini terdapat penambahan pagu bersumber dana PNBP sejumlah Rp11.029.054.000,-. Revisi relaksasi dilakukan pengurangan anggaran pada sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp600.822.000,- dari anggaran semula Rp31.656.754.000,- menjadi Rp31.055.932.000,- terdiri atas belanja pegawai (51) Rp497.483.000,- dan belanja barang (52) Rp103.339.000,-. Revisi pemutakhiran KPA dan revisi Satker/POK dilakukan untuk menyesuaikan pagu disetiap detil untuk mengakomodir percepatan pelaksanaan kegiatan. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 (Per 31 Desember 2025) sesuai data omspan sebesar Rp27.124.640.662,- (87,34%) dengan total blokir Rp2.291.859.000,- dengan rincian realisasi belanja pegawai Rp7.401.629.623,- (92,30%), belanja barang Rp12.977.586.171,- (82,22%), dan belanja modal Rp6.745.424.868,- (93,01%).

Pengukuran capaian kinerja kinerja BPSPL Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja utama atau indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yang tercantum pada perjanjian kerja. Hasil Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM BPSPL Denpasar Tahun 2025 adalah

106,07% yang berkategori baik dengan ditandai warna hijau pada aplikasi kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).

Langkah-langkah strategis yang akan diambil sebagai upaya dalam menjawab berbagai tantangan dan peningkatan kinerja BPSPL Denpasar kedepan antara lain; Melaksanakan peningkatan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Apendiks CITES; Melaksanakan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Denpasar; Melaksanakan peningkatan dalam penataan ruang laut, Melaksanakan peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Denpasar dengan tatakelola pemerintahan yang baik, dan melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala.



BABI PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar telah menunjuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025.

1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar adalah unit pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut tanggal 6 September 2021. Secara khusus UPT mengawal UU No 31 tahun 2004 Jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan beserta turunannya dan UU No. 27 tahun 2007 Jo UU No 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil beserta turunannya. Sehingga BPSPL Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya BPSPL Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;

- 5) Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Denpasar secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
- 2) Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
- 3) Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional.
- 4) Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (*Convention on Biological Diversity*), Ramsar *Convention on Wetlands of Internasional Importance*, WHS (*World Heritage Site*), dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi DJPKRL di daerah, termasuk kerja sama regional seperti *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF);

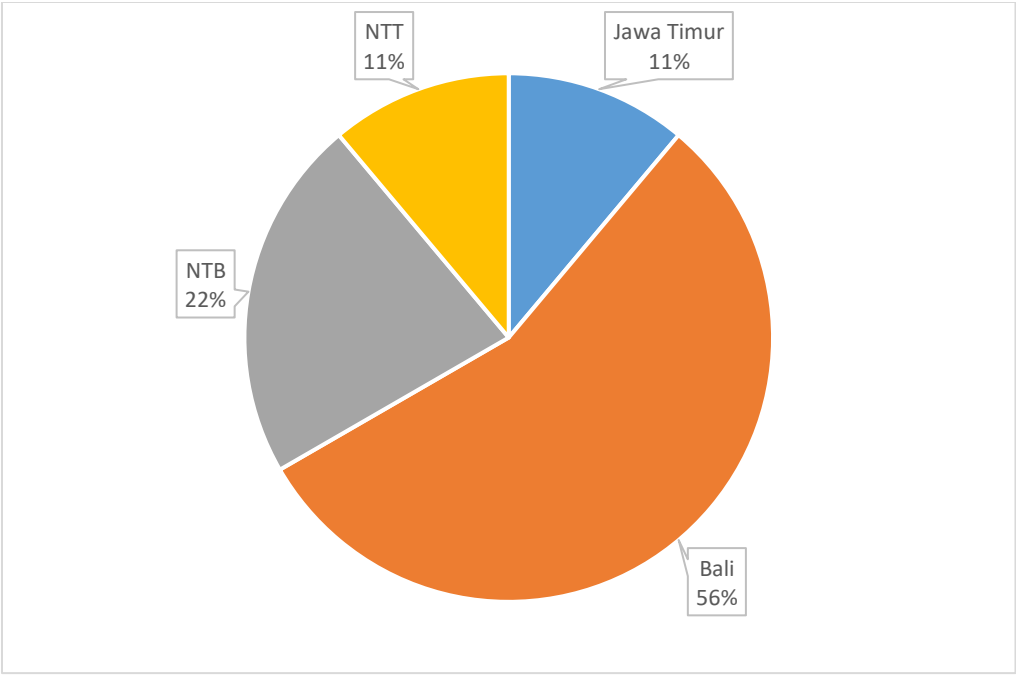
- 5) Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PKRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- 6) Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
- 7) Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.4 Organisasi

Struktur Organisasi BPSPL Denpasar berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN/KP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN/KP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar 1.

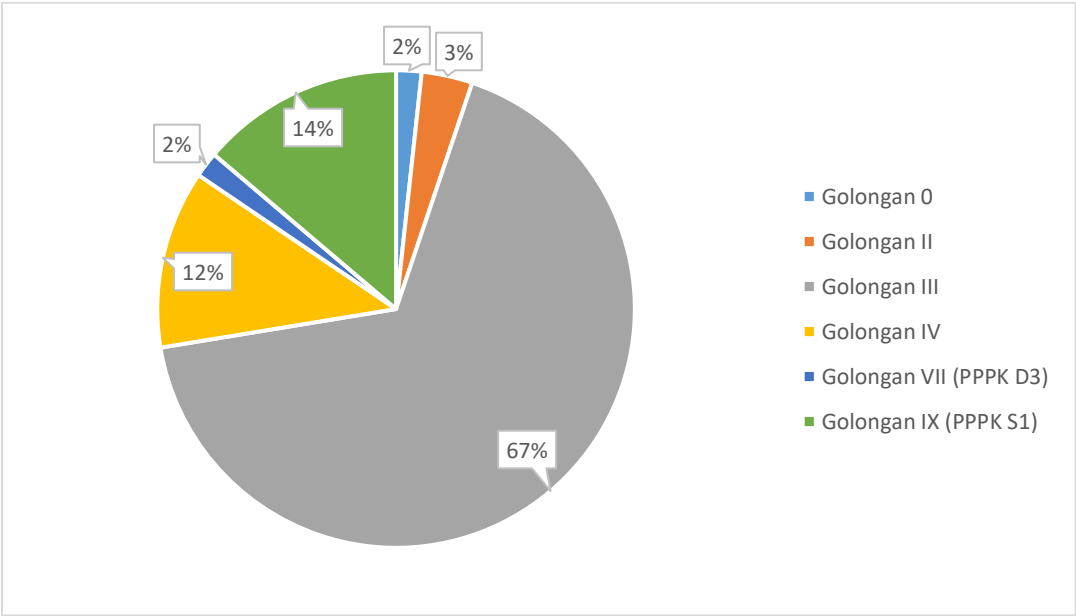


Grafik 2. Perincian PPPK BPSPL Denpasar TA 2025

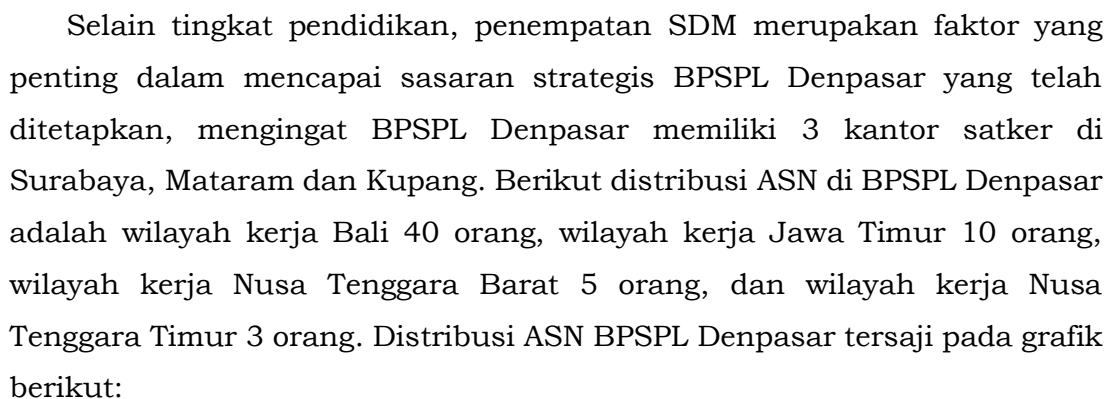


Sedangkan komposisi ASN berdasarkan golongan dan ruang ditampilkan pada grafik sebagai berikut.

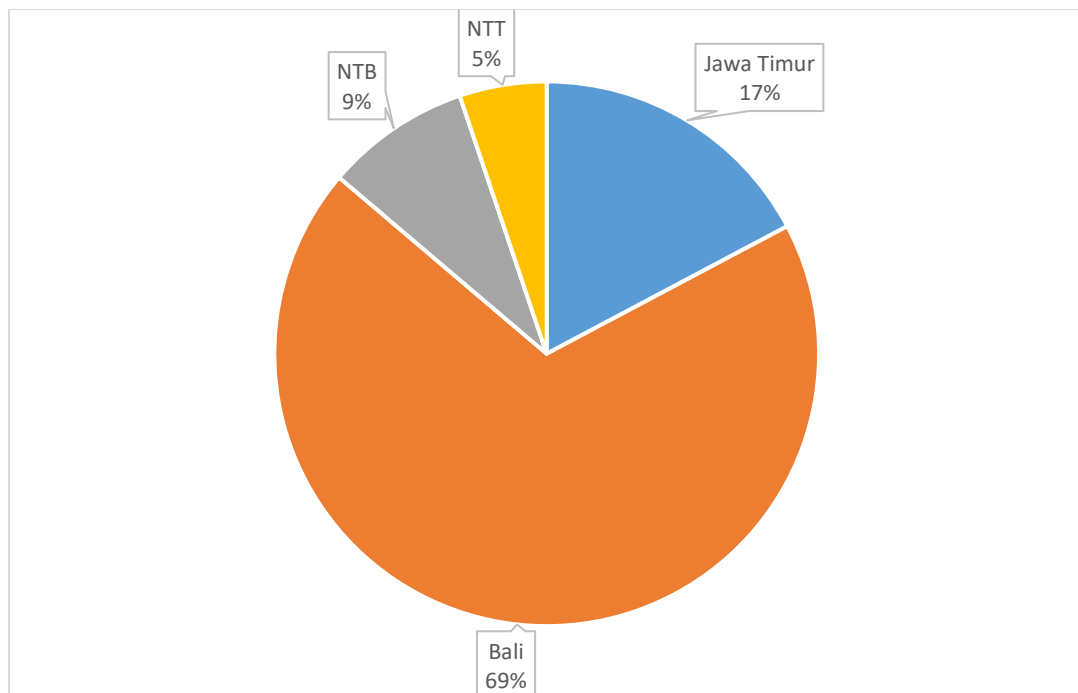
Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan ASN BPSPL Denpasar TA 2025



Grafik 4. Tingkat Pendidikan ASN BPSPL Denpasar TA 2025



Grafik 5. Distribusi SDM BPSPL Denpasar TA 2025



1.6 Potensi

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Secara geografis posisi Indonesia sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² dengan jumlah pulau mencapai 17.504 pulau dimana 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke PBB. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Ditjen PRL, 2020).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut

Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecilnya menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi “services” yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Terumbu Karang merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang tinggi serta memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan estetika yang tinggi, total luasan Terumbu Karang di Indonesia berdasarkan data dari LIPI 2.517.818 HA dengan keanekaragaman yang sangat beragam hingga ratusan lebih jenis karang. Sedangkan Padang lamun menyediakan perlindungan dan makanan bagi beberapa jenis ikan dan kerang-kerangan ekonomis penting. Total luasan Padang Lamun di Indonesia mencapai 1.507 Km² Dengan keanekaragaman jenis. Selain itu terdapat potensi mangrove kritis dan non kritis, ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang mempunyai fungsi dan manfaat yang beraneka ragam bagi manusia serta makhluk hidup lainnya.

Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia

No	Regional	Luas (Ha)
1	Sulawesi	862.627
2	Sumatera	478,587
3	Maluku	439,110
4	Nusa Tenggara	272,123
5	Papua	269,402
6	Kalimantan	119,304
7	Jawa	67,869
8	Bali	8,837
Total		2,517,858

Sumber: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI

Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	PROVINSI	Kritis	Non Kritis
		LUAS (HA)	LUAS HA
1	JAWA TIMUR	6166.809	1340.974
2	BALI	126.193	32.16374
3	NTB	3526.509	3322.79
4	NTT	1859.784	4440.741

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Wilayah Perairan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara selain memiliki potensi sumber daya ikan baik perikanan budidaya maupun tangkap, juga memiliki potensi biota lainnya baik endemik, langka, dan dilindungi dari kelompok cetacean, crustacean, Bivalvia, testudinata (penyu), maupun kelas pisces.

Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

No.	Provinsi	Potensi Perikanan	
		Budidaya (Ha)	Tangkap (ton/tahun)
1	Bali	12.679.041	95.014
2	Jawa Timur	856.487.585	481.499
3	NTB	392.344.829	220.732
4	NTT	92.773.720	123.652

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar juga terdapat beranekaragam biota laut dilindungi yang dapat dilakukan pendataan dan monitoring. Biota tersebut dapat ditemukan di beberapa lokasi antara lain:

- Jawa Timur: Hiu Paus (Probolinggo), Hiu dan Pari Appendiks (Muncar-Banyuwangi, Brondong-Lamongan, Prigi-Trenggalek), Penyu (Banyuwangi, Trenggalek), Terumbu Karang (Banyuwangi, Kangean)
- Bali: Penyu (Gianyar, Klungkung, Denpasar, Badung, Jembrana, Buleleng), Hiu Appendiks (Benoa, Karangasem), Lumba-lumba (Lovina, TNBB), Terumbu Karang (Buleleng, Denpasar, Badung, Nusa Penida), Pari Manta (Nusa Penida-Klungkung)
- NTB: Penyu (Mataram, Kab. Sumbawa), Hiu Pari Appendiks (Tj. Luar, Sumbawa), Terumbu Karang (Lombok Utara, Sumbawa), Hiu Paus (Teluk Saleh-Sumbawa)

- NTT: Dugong (Alor), Lumba-lumba (Alor), Penyu (Lembata, Pulau Solor - Flores Timur), Terumbu Karang (Alor, Sikka, Ende), Teripang (Rote, Riung), Paus (Lembata), Pari Manta (Labuan Bajo), Hiu Pari Appendiks (Namosain-Kupang, Papela-Rote)

BPSPL Denpasar juga melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat dengan memberikan bantuan KOMPAK berupa alat selam. Selain itu, BPSPL Denpasar juga menjalin kerjasama dengan instansi melalui kesepakatan perjanjian kerjasama di wilayah kerja.

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar, terdapat banyak Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil baik yang telah ditetapkan maupun yang sedang dalam proses penetapannya. Adapun status penetapan dan peraturan yang mengatur tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
1	KKPD Nusa Penida	Bali	Klungkung	20,057.00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No.90/KEPMEN-KP/2018 mengganti KEPMENKP No. 24/KEPMEN-KP/2014
2	KKPD Buleleng	Bali	Buleleng	14,041.13	PENCADANGAN	KEPBUP Buleleng No. 523/630/HK/2011
3	KKPD Jembrana	Bali	Jembrana	3,532.52	PENCADANGAN	KEPBUP Jembrana No. 778/DKPK/2013 tanggal 30 Desember 2013
4	KKPD Karangasem	Bali	Karangasem	5,856.31	PENCADANGAN	KEPGUB BALI 375/03-L/HK/2017 tanggal 19 Januari 2017
5	KKM Teluk Benoa	Bali	Badung dan Denpasar	1,243.41	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019
6	KKPD di Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	Sidoarjo	72.32	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
7	KKPD di Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	Probolinggo	374.07	Sudah ditetapkan MKP	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/2020 tanggal 10 Juni 2020
8	KKPD di Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	Pasuruan	4073.74	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
9	KKPD di Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	Situbondo	123.181	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
10	KKPD di Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	Tulungagung	217	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
11	KKPD di Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	Sumenep	72026.14	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
12	KKPD di Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Banyuwangi	412.68	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
13	TWP Gili Sulat dan Gili Lawang	N T B	Kab. Lombok Timur	10000	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 92/KEPMEN-KP/2018
14	TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak	N T B	Kab. Lombok Barat	21132.82	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 93/KEPMEN-KP/2018
15	TWP Pulau Liang dan Ngali	N T B	Kab. Sumbawa	32644.43	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 20/KEPMEN-KP/2020

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
16	TWP Gili Banta	N T B	Kab. Bima	40276.54	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 21/KEPMEN-KP/2020
17	SAP Teluk Cempi	N T B	Kab. Dompu	22257.45	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 22/KEPMEN-KP/2020
18	TWP Teluk Bumbang	N T B	Kab. Lombok Tengah	6310	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
19	TPK Gili Balu	N T B	Kab. Sumbawa Barat	6005.2	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
20	TPK Pulau Kramat, Bedil dan Temudong	N T B	Kab. Sumbawa	2000	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
21	TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk	N T B	Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat	72415.29	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
22	SAP Pulau Lipan dan Pulau Rakit	N T B	Kab. Sumbawa	26640.81	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
23	KKP3K Pulau Panjang	N T B	Kab. Sumbawa	22138.47	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
24	KKP Pulau Medang	N T B	Kab. Sumbawa	11339.56	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
25	KKP3K Pulau Kelapa	N T B	Kab. Bima	6947.28	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
26	KKP3K Pulau Sangiang	N T B	Kab. Bima	48610.01	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
27	KKPD Flores Timur	NTT	Flores Timur	150,000.00	Dicadangkan	Kep Gubernur No 308/KEP/HK/2017
28	KKPD Sikka	NTT	Sikka	207,062.92	Dicadangkan	Kep Gubernur No 107A/KEP/HK/2018
29	KKPD Lembata	NTT	Lembata	76,722.06	Dicadangkan	KepGub NTT nomor 192/Kep/HK/2019
30	KKPD SAP Selat Pantar	NTT	Alor	276,693.38	Ditetapkan	Kepmen KP Nomor 35/KEPMEN-KP/2015

PPKT adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (coral reef), padang lamun (seagrass), dan hutan bakau (mangrove). Wilayah kerja BPSPL Denpasar memiliki 12 pulau-pulau kecil terluar dengan rincian:

- Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu
- Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa)
- Provinsi Bali: Pulau Nusa Penida
- Provinsi Jawa Timur: Pulau Nusabarong (Pulau Barong), Pulau Ngekel (Pulau Sekel), dan Pulau Panikan

Selain menyimpan potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menyimpan potensi bahaya yang dapat membawa bencana apabila kita kurang bijak dalam mengelolanya. Bencana ini tidak hanya yang terjadi secara alami, seperti gempa bumi dan tsunami, namun juga akibat ulah manusia dalam melakukan pembangunan seperti reklamasi atau alih fungsi lahan pesisir yang tidak ramah lingkungan.

1.7 Permasalahan dan Tantangan

BPSPL Denpasar memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Permasalahan dalam penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kendala ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dokumen pendukung. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap KKPD yang telah ditetapkan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan KKPD. Selain itu adanya permasalahan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang, pemanfaatan yang melebihi daya dukung, dan pencemaran. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan pengaturan pemanfaatan ruang pesisir dalam Rencana Zonasi
2. Monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang /zonasi. Diperlukan juga perizinan untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)
3. Pemanfaatan jenis ikan khususnya Hiu dan Pari masih tinggi dan merupakan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Wilayah kerja BPSPL Denpasar merupakan pintu ekspor Hiu dan Pari dengan jumlah dokumen sebanyak 2.412 dokumen sejak tahun 2017 – 2019 baik domestik maupun ekspor. Dalam hal ini BPSPL Denpasar terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kapasitas SDM, sarana prasarana pelayanan, serta pemenuhan kebutuhan data

dan informasi terkait pemanfaatan jenis ikan. Selain itu perlu adanya regulasi yang mengatur PNNP.

4. Belum adanya keseragaman data series keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar. Perlu adanya metode dan standard yang dibuat untuk pendataan.
5. Permasalahan terkait terumbu karang yaitu dijumpainya kelompok kapal penangkapan ikan yang melabuhkan jangkarnya di sekitar terumbu karang yang dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan terjadinya kasus penyakit pada terumbu karang. Perlu dilakukan monitoring dan sosialisasi secara berkala untuk menanggulangi dan mencegah semakin banyaknya kerusakan karang.
6. Aktivitas nelayan yang menambatkan kapal di sekitar padang lamun menyebabkan lamun dapat tergerus lunas kapal, selain itu ancaman tumpahan minyak hasil buangan kapal serta banyaknya suplai sedimen atau lumpur yang berasal dari daratan atau sungai yang bermuara ke laut yang dapat menyebabkan penempelan pada lamun yang dikhawatirkan mempengaruhi proses fotosintesis dimana dampaknya pada tingkat produktivitas primer yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme.
7. Aktivitas *destructive fishing* yang masih terjadi di beberapa perairan di Wilayah kerja BPSPL Denpasar. Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada.
8. Sebaran potensi, dan kelompok masyarakat pengelola jasa kelautan belum teridentifikasi sepenuhnya. Selain itu, pendampingan terhadap keberlanjutan bantuan pemanfaatan jasa kelautan masih belum optimal.
9. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik. Perlu adanya peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

1.8 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2025 disusun dengan dasar hukum :

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan menginformasikan **Capaian Kinerja Pada Tahun Anggaran 2025**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) pada Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif,

Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama triwulan II tahun 2025.

2. Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 – 2029

Panduan strategis dalam merancang pembangunan nasional lima tahun ke depan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 yang memuat prioritas pembangunan yang bertujuan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan pengelolaan kelautan dan ruang laut diarahkan pada lima arah kebijakan ekonomi biru yang menjadi prioritas nasional, yaitu:

1. Perluasan Kawasan Konservasi Laut

Bertujuan melindungi keanekaragaman hayati laut dan menjaga kelestarian ekosistem kritis seperti terumbu karang, mangrove, dan lamun.

2. Penangkapan Ikan Secara Terukur Berbasis Kuota

Penangkapan ikan secara terukur diterapkan melalui sistem kuota yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stok ikan agar tetap lestari, mencegah eksploitasi berlebihan serta meningkatkan produktivitas ekonomi sektor perikanan tangkap.

3. Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan

Perikanan budidaya dikembangkan dengan pendekatan berkelanjutan yang ramah lingkungan, menggunakan teknologi modern, dan mendorong efisiensi produksi.

4. Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan ruang laut dan pesisir yang efektif dioptimalkan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mendukung pemanfaatan ruang laut yang tertib dan berkelanjutan. Pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan diperkuat untuk mengatasi potensi konflik pemanfaatan ruang serta melindungi ekosistem pesisir dari aktivitas merusak.

5. Pengendalian Sampah Plastik di Laut

Penanganan sampah plastik di laut akan menjadi prioritas dalam mendukung kebersihan ekosistem laut dan pesisir. Melalui pendekatan hulu ke hilir, mencakup pengurangan sumber plastik dari darat,

optimalisasi pengelolaan limbah, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan laut.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja tahun 2025 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di”*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Dengan metode atau pendekatan BSC, telah dilakukan restrukturisasi SAKIP KKP dimulai dari level Renstra kementerian sampai dengan level monitoring dan pengukuran kinerja. Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK), BPSPL Denpasar menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Denpasar berpedoman pada sasaran kegiatan yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Dalam perkembangannya, perjanjian kinerja BPSPL Denpasar sampai dengan Triwulan IV mengalami penyesuaian sebanyak dua kali. Perjanjian Kinerja awal disahkan pada tanggal 24 Januari 2025. Kemudian dilakukan perubahan pertama dan disahkan pada Juni 2025 dan perubahan kedua disahkan pada Desember 2025 . Adapun perubahan yang dilakukan anatara lain; pemisahan perjanjian kinerja Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut yaitu pada Indikator Kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen), serta penambahan Indikator Kinerja Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai) pada perjanjian kinerja Kepala BPSPL Denpasar dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan. Pada perubahan kedua dilakukan penambahan anggaran dengan sumber dana PNBP dengang total penambahan Rp11.029.054.000,-. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1.	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	1
2.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	30
3.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
4.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)	80
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
6.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	6.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar	7.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	70
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	89
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	71,5
		10.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		11.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks)	80
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Denpasar (%)	95
		13.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		15.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80
		16.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76
		17.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai)	91

Renstra Sekretariat Jenderal Direktorat Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 menjadi pedoman utama dalam penetapan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis pengelolaan kelautan. Sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh BPSPL Denpasar ke dalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi balai, khususnya dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja BPSPL Denpasar Tahun 2025 disusun dengan mengacu secara langsung pada Renstra Sekretariat Jenderal Direktorat Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029. Rencana kerja memuat program, kegiatan, serta target kinerja tahunan yang merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Renstra. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas strategis yang ditetapkan dalam Renstra.

Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen kinerja antara Kepala BPSPL Denpasar dengan atasan langsung. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, serta target yang secara konsisten mengacu pada sasaran dan indikator yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2025. Dengan demikian, terdapat kesinambungan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja.

Keselarasan antara Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja ini memungkinkan pengendalian dan evaluasi kinerja dilakukan secara efektif. Capaian kinerja yang diukur dalam Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis Renstra. Hal ini juga mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berorientasi pada hasil.

Dengan terwujudnya keselarasan Renstra Sekretariat Jenderal Direktorat Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan BPSPL Denpasar dapat berjalan secara terarah, efektif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Tahun 2025		%Kinerjaku
			Target	Capaian	
3	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	Tahun	5,00	7,00	120
4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	80,00	90,00	112
5	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	Tahun	1,00	1,00	100
6	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	Tahun	2,00	2,00	100
7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	70,00	86,90	120
8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	89,00	94,11	105
9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	71,50	97,86	120
10	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	Triwulan	4,00	4,00	100

No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Tahun 2025		%Kinerjaku
			Target	Capaian	
11	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks)	Semester	80,00	86,85	108
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Denpasar (%)	Triwulan	95,00	87,00	91
13	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	Tahun	100,00	100,00	100
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	75,00	87,57	116
15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	80,00	86,11	107
16	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	Triwulan	76,00	100,00	120
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	91,00	100,00	109

3.2 Kinerja Anggaran

Pagu awal BPSPL Denpasar tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp20.627.700.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp12.012.700.000,-, PNPB Rp2.075.000.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp6.540.000.000,-. Dari pagu awal terdapat dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) berupa blokir kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) dan blokir kode 2 (alokasi harus dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait) sebesar Rp2.905.441.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp2.880.941.000,- dan belanja modal (53) sebesar Rp 24.500.000,-.

Pada Bulan Februari Tahun 2025, terdapat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi pada anggaran dibawah pengelolaannya. Setelah dilakukan revisi DIPA efisiensi anggaran pada tanggal 23 Februari 2025, pagu anggaran BPSPL Denpasar sebesar Rp20.627.700.000,- dengan jumlah dana yang diblokir sebesar Rp4.523.858.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) Rp 4.499.358.000,- dan belanja modal (53) Rp24.500.000,-.

Pada Triwulan II terdapat pengesahan revisi DIPA berupa penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA dalam rangka buka blokir anggaran kode 2 pada sumber dana PNPB sebesar Rp. 2.075.000.000,- sesuai surat dari Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan nomor S-531/AG/AG.3/2025 tanggal 17 Juni 2025. Adapun anggaran belum dapat digunakan dikarenakan masih menunggu persetujuan penetapan Maksimum Pencairan PNPB dari Kementerian Keuangan. Sampai dengan Triwulan II terdapat dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) berupa blokir kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) sebesar Rp2.395.198.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp2.395.198.000,-. Realisasi sampai dengan Triwulan II (Per 30 Juni 2025) sesuai data omspan sebesar Rp5.090.577.395,- (24,68%) dengan rincian realisasi belanja pegawai Rp3.873.645.353,- (45,48%), belanja barang Rp1.216.932.042,- (10,15%), dan belanja modal Rp0,- (0%).

Pada Triwulan III telah dilaksanakan revidi rekomposisi usulan tambahan izin penggunaan PNPB Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 tanggal 10-11 September 2025. Rekomposisi ini dilaksanakan karena adanya penambahan

anggaran sumber dana PNPB Tahun Anggaran 2025 yang semula Rp1.200.000.000,- menjadi Rp11.650.000.000,-. Peruntukan penambahan anggaran ini untuk mengakomodir belanja selain belanja perjalanan dinas. Pada Triwulan ini juga dilaksanakan pembahasan rekomposisi usulan tambahan izin penggunaan PNPB Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tanggal 1 dan 2 Oktober 2025. BPSPL Denpasar mengusulkan penambahan anggaran sebesar 620.000.000 dari yang semula 875.000.000 menjadi 1.495.000.000. penambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanja modal peralatan dan mesin.

BPSPL Denpasar telah melakukan tiga kali revisi DIPA pada Triwulan III antara lain; Revisi Halaman III DIPA pada tanggal 15 Juli 2025, Revisi Perubahan Kantor Bayar tanggal 19 Agustus 2025 (Revisi ini untuk melakukan koreksi kantor bayar pada kegiatan dengan sumber dana Pinjaman Luar Negeri yang semula KPPN Denpasar (037) menjadi KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)), dan Revisi DIPA Pemutakhiran KPA tanggal 21 Agustus 2025 untuk mengakomodir perubahan POK kegiatan. Realisasi sampai dengan Triwulan III (Per 30 September 2025) sesuai data omspan sebesar Rp Rp8.671.656.662,- (42,04%) dengan rincian realisasi belanja pegawai Rp5.404.867.509,- (63,46%), belanja barang Rp3.244.305.548,- (27,07%), dan belanja modal Rp22.483.605,- (18,07%).

Pada Triwulan IV dilakukan sebelas kali revisi anggaran meliputi satu kali revisi halaman III DIPA, lima kali revisi pemutakhiran KPA, dua kali revisi Satker/POK, satu kali revisi DIPA kewenangan Kanwil, satu kali revisi penambahan pagu sumber dana PNPB, dan satu kali revisi DIPA relaksasi anggaran. Pada triwulan ini terdapat penambahan pagu bersumber dana PNPB sejumlah Rp11.029.054.000,-. Penambahan anggaran ini untuk sewa gerai pelayanan di delapan lokasi wilayah kerja BPSPL Denpasar yaitu Denpasar, Surabaya, Mataram, Gorontalo, Mamuju, Makassar, Palu, dan Kendari; pengadaan sarana pendukung penyelenggaraan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut; pengadaan sarana pendukung penyelenggaraan konservasi biota perairan; pengadaan sarana pendukung penyelenggaraan penataan ruang laut; Belanja jasa lainnya kegiatan peningkatan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Apendiks CITES.

Revisi relaksasi dilakukan pengurangan anggaran pada sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp600.822.000,- dari anggaran semula Rp31.656.754.000,- menjadi Rp31.055.932.000,- terdiri atas belanja pegawai (51) Rp497.483.000,- dan belanja barang (52) Rp103.339.000,-. Revisi pemutakhiran KPA dan revisi Satker/POK dilakukan untuk menyesuaikan pagu disetiap detil untuk mengakomodir percepatan pelaksanaan kegiatan.

Realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 (Per 31 Desember 2025) sesuai data omspan sebesar Rp27.124.640.662,- (87,34%) dengan total blokir Rp2.291.859.000,- dengan rincian realisasi belanja pegawai Rp7.401.629.623,- (92,30%), belanja barang Rp12.977.586.171,- (82,22%), dan belanja modal Rp6.745.424.868,- (93,01%).

Tabel 8. Realisasi Anggaran BPSPL Denpasar Tahun 2025

Uraian		Pagu	Realisasi	%
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	16,313,785,000	15,490,947,559	94.96 %
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	16,313,785,000	15,490,947,559	94.96 %
	QMA			
	Data dan Informasi Publik	7,395,931,000	6,967,519,194	94.21 %
	QMA.002			
	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	7,395,931,000	6,967,519,194	94.21 %
	051			
	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	7,395,931,000	6,967,519,194	94.21 %
	051.0A			
	Pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Appendiks CITES	1,122,392,000	1,040,460,792	92.70 %
	051.0B			
	Peningkatan Pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Appendiks CITES	497,600,000	496,098,402	99.70 %
	051.0C			
	Sewa Kantor Pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Appendiks CITES	5,775,939,000	5,430,960,000	94.03 %
	RAL			
	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	4,013,123,000	3,837,656,288	95.63 %
	RAL.001			
	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	313,820,000	313,790,020	99.99 %
	051			
	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	313,820,000	313,790,020	99.99 %
	051.0A			
	Pengadaan Peralatan Pendukung Penyelenggaraan Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	313,820,000	313,790,020	99.99 %
	RAL.002			
	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan	3,699,303,000	3,523,866,268	95.26 %
	051			
	Jumlah Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan	3,699,303,000	3,523,866,268	95.26 %
	051.0A			
	Pengadaan Peralatan Pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Appendiks CITES	765,847,000	741,368,068	96.80 %
	051.0B			
	Pengadaan Peralatan Survey Data Potensi	449,700,000	449,505,600	99.96 %
	051.0C			
	Pengadaan Peralatan Identifikasi Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	41,000,000	40,903,500	99.76 %
	051.0D			
	Pengadaan dan Sewa Peralatan Respon Cepat Penanganan Keterdamparan dan Konflik Biota	2,417,500,000	2,267,300,000	93.79 %
	051.0E			
	Pengadaan Sarana Prasarana Petugas Pelayanan Perijinan Jenis	25,256,000	24,789,100	98.15 %
	REA			
	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	4,904,731,000	4,685,772,077	95.54 %
	REA.004			
	Oceans for Prosperity Project - LAUTRA	4,904,731,000	4,685,772,077	95.54 %
	051			
	Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang Lautan Sejahtera	4,904,731,000	4,685,772,077	95.54 %
	051.0A			
	Dukungan Operasional dan Pendampingan Pelaksanaan Proyek	150,000,000	148,447,009	98.96 %
	051.0A			
	LAUTRA	150,000,000	148,447,009	98.96 %
	051.0B			
	Monitoring Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	450,000,000	440,204,589	97.82 %
	051.0C			
	Respon Cepat Penanganan Biota Perairan di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	150,000,000	130,524,262	87.02 %
	051.0D			
	Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	300,000,000	293,073,203	97.69 %
	051.0E			
	Penguatan Kapasitas Pengelola dan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	700,000,000	681,237,426	97.32 %
	051.0F			
	Fasilitasi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	560,000,000	556,199,888	99.32 %

Uraian					Pagu	Realisasi	%
			051.0G	Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	2,594,731,000	2,436,085,700	93.89 %
			051.0H	Blokir Anggaran LAUTRA	0	0	0.00 %
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				1,695,000,000	1,691,726,662	99.81 %
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				200,000,000	197,265,788	98.63 %
	PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan			200,000,000	197,265,788	98.63 %
	PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar			200,000,000	197,265,788	98.63 %
		051	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun (PNBP)		200,000,000	197,265,788	98.63 %
			051.0A	Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	200,000,000	197,265,788	98.63 %
HB.2366	Penataan Ruang Laut				1,495,000,000	1,494,460,874	99.96 %
	PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan			875,000,000	874,473,149	99.94 %
	PBT.009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah			875,000,000	874,473,149	99.94 %
		052	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut		78,053,000	77,887,825	99.79 %
			052.0A	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	78,053,000	77,887,825	99.79 %
		053	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut		796,947,000	796,585,324	99.95 %
			053.0A	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	286,237,000	286,177,442	99.98 %
			053.0B	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	510,710,000	510,407,882	99.94 %
	RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan			620,000,000	619,987,725	100.00 %
	RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut			620,000,000	619,987,725	100.00 %
		051	Sarana pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut		620,000,000	619,987,725	100.00 %
			051.0A	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut	620,000,000	619,987,725	100.00 %
WA	Program Dukungan Manajemen				10,755,288,000	10,124,980,099	94.14 %
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut				10,755,288,000	10,124,980,099	94.14 %
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			10,464,335,000	9,835,385,486	93.99 %
	EBA.956	Layanan BMN			48,770,000	48,640,396	99.73 %
		051	Layanan BMN		48,770,000	48,640,396	99.73 %
			051.0A	Pengelolaan Barang Milik Negara	48,770,000	48,640,396	99.73 %
	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			15,294,000	15,292,668	99.99 %
		051	Layanan Kehumasan		15,294,000	15,292,668	99.99 %
			051.0A	Layanan Kehumasan	15,294,000	15,292,668	99.99 %
	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			6,335,000	6,128,558	96.74 %
		051	Layanan Organisasi dan Tata Laksana lingkup Ditjen PRL		6,335,000	6,128,558	96.74 %
			051.0A	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	6,335,000	6,128,558	96.74 %
	EBA.962	Layanan Umum			81,009,000	80,533,882	99.41 %
		051	Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan		32,982,000	32,606,908	98.86 %
			051.0A	Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	32,982,000	32,606,908	98.86 %
		052	Layanan Rumah Tangga		48,027,000	47,926,974	99.79 %
			052.0A	Layanan Rumah Tangga	48,027,000	47,926,974	99.79 %
	EBA.994	Layanan Perkantoran			10,312,927,000	9,684,789,982	93.91 %
		001	Gaji dan Tunjangan		8,019,517,000	7,411,987,281	92.42 %
			001.0A	Pembayaran gaji dan tunjangan	8,019,517,000	7,411,987,281	92.42 %
		002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2,293,410,000	2,272,802,701	99.10 %
			002.0A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,293,410,000	2,272,802,701	99.10 %
	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			65,355,000	64,950,193	99.38 %

Uraian						Pagu	Realisasi	%	
	EBC.954		Layanan Manajemen SDM			65,355,000	64,950,193	99.38 %	
			051	Layanan Manajemen SDM			65,355,000	64,950,193	99.38 %
				051.0A	Layanan SDM		65,355,000	64,950,193	99.38 %
	EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal			225,598,000	224,644,420	99.58 %	
	EBD.952		Layanan Perencanaan dan Penganggaran			70,594,000	70,094,724	99.29 %	
			051	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran			70,594,000	70,094,724	99.29 %
				051.0A	Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran		70,594,000	70,094,724	99.29 %
	EBD.953		Layanan Pemantauan dan Evaluasi			49,991,000	49,974,522	99.97 %	
			051	Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan			49,991,000	49,974,522	99.97 %
				051.0A	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan		49,991,000	49,974,522	99.97 %
	EBD.955		Layanan Manajemen Keuangan			105,013,000	104,575,174	99.58 %	
			051	Layanan Manajemen Keuangan			105,013,000	104,575,174	99.58 %
				051.0A	Pengelolaan Keuangan		105,013,000	104,575,174	99.58 %

3.3 Evaluasi atas Capaian Kinerja Tahun 2025

IK 1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah adalah Provinsi yang didampingi dan difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Formulasi perhitungan yaitu dengan menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar yang didampingi dalam proses penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah.

Tabel 9. Capaian IK 1 BPSPL Denpasar

SK 1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar					
IK 1	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	1	1	100	100	1	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi) telah tercapai 1 Provinsi dari target 1 Provinsi (100%) yaitu Provinsi Nusa Tenggara

Timur. Adapun kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja ini antara lain: Dukungan Operasional dan Pendampingan Pelaksanaan Proyek LAUTRA, Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor, Respon Cepat Penanganan Biota Perairan di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor, Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor, Fasilitasi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor, dan Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor. Uraian masing-masing kegiatan tercantum dalam poin Kegiatan Pendukung.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat Indikator Kinerja Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi).

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai fasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

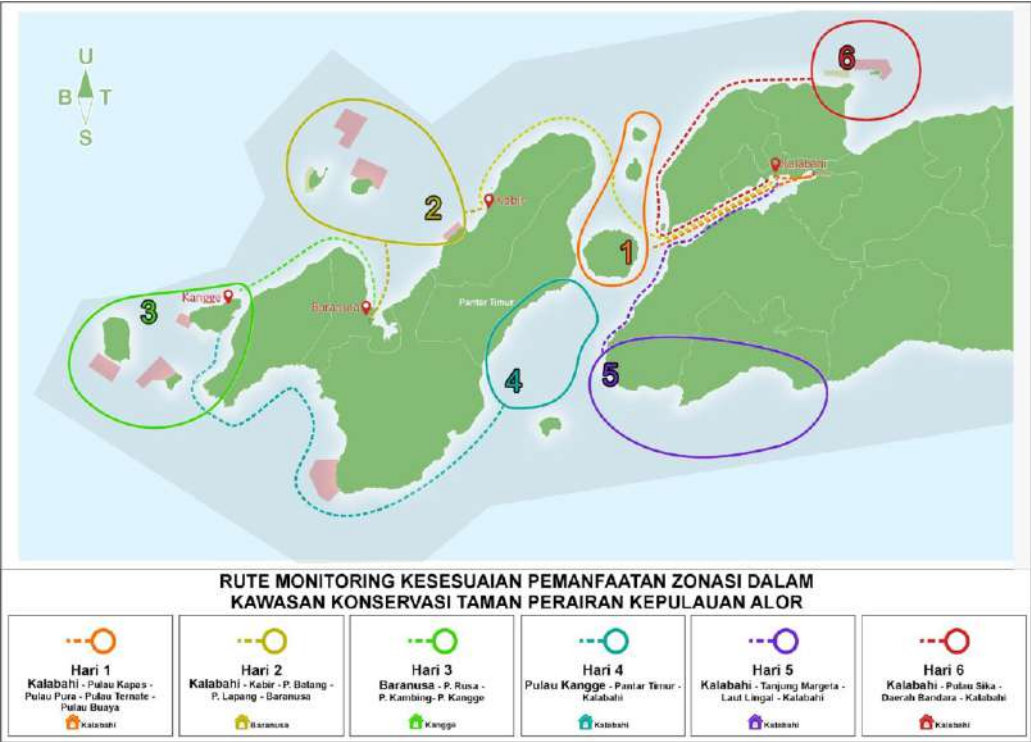
Kegiatan pendukung pada IK Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi) antara lain:

1. Dukungan Operasional dan Pendampingan Pelaksanaan Proyek LAUTRA

Kegiatan Dukungan Operasional dan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan LAUTRA telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya serta memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran implementasi Proyek LAUTRA Tahun Anggaran 2025 melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan koordinasi, evaluasi, dan pendampingan teknis.

2. Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

Salah satu bentuk upaya yang menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah melakukan pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi untuk menurunkan ancaman dan meningkatkan kepatuhan dalam pemanfaatan di dalam kawasan konservasi. Hal ini juga yang menjadi tindak lanjut dan rekomendasi penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya. Oleh karena itu, melalui program LAUTRA, BPSPL Denpasar berupaya memfasilitasi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor untuk melakukan monitoring kesesuaian zonasi dalam kegiatan pemanfaatan di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Gambar 3. Lokasi Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

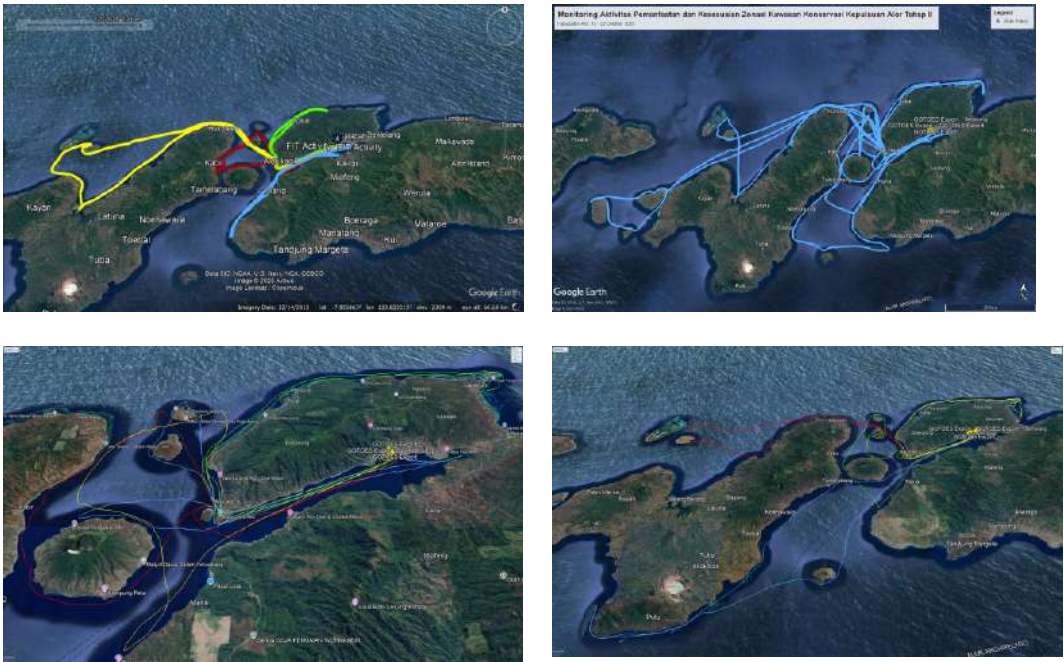
Monitoring dilaksanakan dalam 4 tahap dan telah menjangkau seluruh kawasan konservasi atau 100% dari total luas kawasan. Adapun rincian monitoring aktivitas pemanfaatan dan kesesuaian zonasi kawasan konservasi di perairan di Kepulauan Alor tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10. Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

Tanggal	Rute Tempuh	Area yang Dijangkau
14 – 23 September 2025 (Tahap I)	391,20 Km	Hari Pertama: Kalabahi – Pulau Pura – Pulau Ternate – Pulau Buaya – Kalabahi Hari Kedua: Kalabahi – Pulau Lapang – Pulau Batang – Baranusa – Kalabahi Hari Ketiga: Kalabahi – Alor Kecil – Alor Besar – Batu Putih – Kalabahi Hari Keempat: Kalabahi Tanjung Gereja – Abad - Kalabahi
13 – 24 Oktober 2025 (Tahap II)	989,20 Km	Hari Pertama: Kalabahi – Alor Kecil - Pulau Ternate - Pantar Utara – Pulau Kangge - Pulau Lapang - Pulau Rusa - Pulau Kangge - Pantar Utara – Pulau Ternate - Alor Kecil – Kalabahi Hari Kedua: Kalabahi – Alor Kecil - Pulau Ternate - Pantar Utara – Pulau Ternate - Pulau Pura bagian utara - Alor Kecil – Kalabahi Hari Ketiga: Kalabahi – Alor Kecil - Pulau Ternate - Pantar Utara - Desa Kabir - Desa Pandai - Desa Munaseli - Pulau Ternate - Alor Kecil – Kalabahi Hari Keempat: Kalabahi – Pesisir Desa Halerman - Pesisir Desa Mawar - Utara Pulau Ternate - Alor Kecil - Timur Pulau Pura – Kalabahi Hari Kelima:

Tanggal	Rute Tempuh	Area yang Dijangkau
		Kalabahi - Pesisir Desa Margeta - Utara Pulau Trewang – Barat Pulau Pura - Alor Kecil – Kalabahi Hari Keenam: Kalabahi - Alor Kecil - Pulau Sika - Pesisir Desa Adang – Alor Kecil – Kalabahi Hari Ketujuh: Kalabahi - Alor Kecil - Pulau Ternate - Pulau Pura - Alor Kecil - Pulau Buaya - Barat Pulau Ternate - Alor Kecil – Kalabahi Hari Kedelapan: Kalabahi - Alor Kecil - Pulau batang - Pulau lapang - Pelabuhan Baranusa - Alor Kecil - Kalabahi
17 – 24 November 2025 (Tahap III)	413,64 Km	Hari Pertama: Kalabahi – Pulau Buaya - Pulau Ternate - Pulau Pura – Pulau Kapas – Kalabahi Hari Kedua: Kalabahi – Alor Kecil - Pulau Pura - Pulau Ternate – Kalabahi Hari Ketiga: Kalabahi – Alor Kecil - Pulau Kepa – Pulau Pura – Pulau Buaya - Pulau Ternate - Pulau Kapas – Kalabahi Hari Keempat: Kalabahi – Alor Kecil - Alor Besar - Pulau Sikka - Alor Besar - Alor Kecil – Kalabahi Hari Kelima:

Tanggal	Rute Tempuh	Area yang Dijangkau
		Kalabahi – Pantai Mali – Pulau Sikka – Kalabahi
11 -19 Desember 2025 (Tahap IV)	490,72 Km	Hari Pertama: Kalabahi – Pulau Treweng – Souyang - Pulau Pura – Alor Kecil – Kalabahi Hari Kedua: Kalabahi – Pulau Sikka - Alor Kecil – Kalabahi Hari Ketiga: Kalabahi – Pulau Batang - Pulau Lapang – Kalabahi Hari Keempat: Kalabahi – Pulau Pura – Pulau Ternate – Pulau Buaya - Alor Kecil – Kalabahi



Gambar 4. Rute Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

Hasil dari kegiatan monitoring aktivitas pemanfaatan dan kesesuaian zonasi kawasan konservasi di perairan di Kepulauan Alor antara lain: ditemukan aktivitas penangkapan ikan dan penempatan alat bantu penangkapan ikan, budi daya mutiara, pariwisata alam perairan, transportasi untuk pelayaran rakyat, pelayaran kapal penumpang, pelayaran kapal barang, dan penempatan infrastruktur laut berupa pelabuhan dan dermaga. Aktivitas pemanfaatan banyak dilakukan di zona pemanfaatan terbatas. Aktivitas yang tidak sesuai dengan zonasi di Taman Perairan Kepulauan Alor antara lain penangkapan ikan oleh nelayan tradisional di zona inti, pelayaran rakyat di zona inti, dan penangkapan ikan di zona lain (zona pelabuhan).

3. Respon Cepat Penanganan Mamalia Terdampar di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

Kegiatan ini dengan melakukan penanganan biota laut dilindungi terdampar hidup atau mati secara tanggap di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor serta meningkatkan pengetahuan stakeholder di Kawasan Konservasi Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dalam melakukan penanganan biota perairan dilindungi yang terdampar secara cepat, tepat dan aman. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Melaksanakan Bimbingan Teknis Penanganan Biota Perairan Terdampar (*First Responder*) pada tanggal 11 – 12 November 2025 di Hotel Simfony Alor
- Melaksanakan respon cepat mamalia laut yaitu lumba-lumba terdampar tanggal 6 Desember 2025

4. Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar membantu pendampingan pengelolaan kawasan konservasi di Kepulauan Alor melalui kegiatan LAUTRA akan melaksanakan kegiatan Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Kawasan Perairan di Kepulauan Alor. Kegiatan Penjangkauan ini diharapkan dapat menjadi sarana penyadartahuan, pemberian informasi, dan penguatan pelibatan masyarakat yang berada di Kawasan Perairan di Kepulauan Alor untuk paham mengenai pengetahuan dan informasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kawasan Perairan di Kepulauan Alor. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi penunjang dalam kegiatan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan peran Masyarakat dan isu-isu berkembang yang terdapat pada kalangan stakeholder yang berada pada kawasan konservasi untuk selanjutnya informasi dan data yang diperoleh dapat diolah untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang dapat menunjang perkembangan dan kemajuan Kawasan Konservasi.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu kawasan konservasi dalam mempertahankan Nilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Rapat koordinasi pembahasan bahan ajar mengenai Kawasan konservasi untuk jenjang SMP dan SMA tanggal 23 Oktober 2025 di Hotel Harper Kupang dan tanggal 27 November 2025 di Hotel Simfony Alor
- Penjangkauan *stakeholder* dalam rangka LAUTRA: *Empowering Youth* 2025 pada tanggal 24 November 2025 di SMA Negeri 2 Kalabahi, Kab. Alor
- Forum keterlibatan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Alor tanggal 25 November 2025 di Hotel Simfony Alor
- Kemitraan strategis pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Alor tanggal 26 November 2025 di Hotel Simfony Alor
- Publikasi kegiatan dan pemberian bahan sosialisasi



Gambar 5. Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Alor

5. Fasilitasi Persiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

Tujuan dari kegiatan ini adalah memfasilitasi UPTD bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga dengan adanya BLUD layanan umum menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

Dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah dibidang konservasi yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah sebagai penanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Koordinasi dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Regulasi Operasionalisasi Penerapan BLUD tanggal 1 – 4 September 2025 di Kupang, tanggal 29 September 2025 di Alor
 - Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur terkait BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya tanggal 30 September 2025 di Kupang
 - Rapat koordinasi kelompok kerja pembahasan draft Regulasi Penerapan BLUD pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya tanggal 21 – 22 Oktober 2025 di Kupang
 - Konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa konsultasi draft regulasi penerapan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya tanggal 18 – 20 November 2025 di Jakarta
 - Konsultasi publik dan/atau sosialisasi rancangan peraturan Gubernur Regulasi Penerapan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya tanggal 27 November 2025 dan 18 – 19 Desember 2025 di Alor
6. Sarana dan Prasarana untuk Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor
- Salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh tim penilai EVIKA Tahun 2024 kepada SUOP/UPTD dan/atau Pemerintah Daerah untuk peningkatan skor EVIKA pada tahun-tahun berikutnya adalah melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan. Untuk mencapai hal tersebut maka BPSPL Denpasar melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelola kawasan di wilayah kawasan konservasi lokasi proyek Lautra di wilayah kerja BPSPL Denpasar yaitu di Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi	Dokumentasi
3	Container box	4 unit	Penyimpanan dan pengamanan peralatan	Menjaga kelayakan dan umur pakai peralatan	
4	Hanger alat selam	20 unit	Pengeringan dan penyimpanan alat selam	Meningkatkan perawatan dan kesiapan alat	
5	Stand hanger	2 unit	Penataan peralatan selam	Mendukung tata kelola logistik peralatan	

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi	Dokumentasi
6	GPS	5 unit	Penentuan posisi dan pemetaan lapangan	Mendukung pengawasan zonasi dan survei kawasan	
7	Komputer	5 unit	Pengolahan data dan pelaporan	Memperkuat administrasi dan sistem informasi pengelolaan	
8	Printer	5 unit	Pencetakan laporan dan dokumen	Mendukung dokumentasi dan pelaporan resmi	
9	Kamera GoPro	2 unit	Dokumentasi bawah air	Bukti visual kondisi ekosistem dan aktivitas lapangan	

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi	Dokumentasi
10	Drone	1 unit	Pemantauan kawasan dari udara	Memperkuat pengawasan aktivitas pemanfaatan kawasan	 21 Dec 2025 at 13.27.51 8° 36' 2" S, 115° 19' 33" E Profesor Ida Bagus Mantra Bypass Gianyar Bali
11	Drone Flymore Kit	2 set	Aksesori dan cadangan operasional drone	Menjamin keberlanjutan operasi pengawasan udara	 21 Dec 2025 at 13.27.55 8° 36' 2" S, 115° 19' 33" E Profesor Ida Bagus Mantra Bypass Gianyar Bali
12	Drone Battery	1 set	Daya cadang drone	Memperpanjang waktu operasi pemantauan	 21 Dec 2025 at 13.27.59 8° 36' 2" S, 115° 19' 33" E Profesor Ida Bagus Mantra Bypass Gianyar Bali

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi	Dokumentasi
13	Echosounder	1 unit	Pengukuran kedalaman dan struktur dasar laut	Mendukung analisis habitat dan daya dukung	 21 Dec 2025 at 13.17.32 8° 36' 2" S, 115° 19' 33" E Profesor Ida Bagus Mantra Bypass Gianyar Bali
14	Kamera Logitech Rally	1 unit	Konferensi dan dokumentasi rapat	Mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan	 21 Dec 2025 at 15.38.48 8.600735, 115.325884 Profesor Ida Bagus Mantra Bypass Gianyar Bali Indonesia
15	Microphone wireless meja	2 set	Audio rapat dan diskusi	Memperkuat komunikasi dan dokumentasi	 Dec 20, 2025 11:00:45 8°36'3.04"S 115°19'33.371"E Pering Blahbatuh Gianyar Regency Bali

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi	Dokumentasi
16	Alat pengukur kualitas air	2 unit	Pengukuran parameter kualitas air	Mendukung penilaian kesehatan ekosistem	
17	Digital interactive board	1 unit	Presentasi dan analisis data	Mendukung evaluasi dan pelaporan kinerja	
18	Genset	1 unit	Cadangan listrik operasional	Menjamin kelangsungan operasional lapangan	

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi	Dokumentasi
19	AC 0,5 PK	2 unit	Pendingin ruangan	Meningkatkan kenyamanan kerja petugas	
20	AC 1 PK	2 unit	Pendingin ruangan	Mendukung produktivitas pengelola	
21	Pencetak ID Card	1 unit	Identifikasi petugas dan pengunjung	Mendukung pengendalian akses dan pelayanan	

Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan pengelola masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar. Jumlah peserta dihitung berdasarkan orang dan jenis kegiatan pelatihan/bimtek yang dilakukan.

Tabel 12. Capaian IK 2 BPSPL Denpasar

SK 2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar					
IK 2	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
25	30	30	100	-	30	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang) adalah 30 orang dari target 30 orang (100%). Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan dan sertifikasi selam SCUBA serta pelatihan dan sertifikasi penilai kondisi terumbu karang dengan jumlah total 30 orang yang terdiri dari masyarakat dan pengelola kawasan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 sama dengan capaian kinerja tahun 2024 sehingga tidak ada kenaikan yang signifikan pada tahun berjalan. Sama sama memperoleh capaian 100%. Tahun 2024 target 25 orang tercapai 25 orang. Begitu juga tahun 2025 target 30 orang tercapai 30 orang.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**b. Analisis Keberhasilan**

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar adalah Penguatan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor merupakan salah satu wilayah dengan biodiversitas laut tertinggi di Indonesia, mencakup ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove, serta keberadaan berbagai megafauna laut. Keindahan bawah laut tersebut telah menarik ribuan wisatawan untuk datang ke Alor dan menyelam sehingga Alor dikenal sebagai destinasi wisata selam dengan sebaran 79 titik selam (dive spot). Terumbu karang menjadi sumber daya utama (target konservasi) bagi kelangsungan Kawasan Konservasi Alor. Salah satu bentuk penjagaannya adalah terpantaunya kondisi terumbu karang secara periodik. Data tersebut menjadi salah satu dasar penentuan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Ketersediaan personil SUOP yang memiliki kompetensi menilai kondisi terumbu karang dan tersedianya data kondisi terumbu karang merupakan butir-butir penting dalam pemenuhan komponen nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Adapun pelaksanaan kegiatan menjadi dua tahap, yaitu:

- Pelatihan dan Sertifikasi Selam SCUBA di Alor dengan peserta sejumlah 22 orang
- Pelatihan dan Sertifikasi Penilai Kondisi Terumbu Karang di Kab. Karangasem dengan peserta sejumlah 8 orang



Gambar 6. Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi

IK 3. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)

Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatan secara berkelanjutan atau jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatan dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES, serta *look a like species* seperti Hiu, Pari, *Soft Coral*, Banggai Cardinal Fish dan Teripang.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES, serta *look a like spesies* yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 13. Capaian IK 3 BPSPL Denpasar

SK 3	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar					
IK 3	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
6	5	7	140	20	5	140

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) adalah tercapai 7 jenis dari target 5 jenis (140%). Adapun jenis ikan yang dilayani oleh Balai Pengelolaan Pesisir dan Laut Denpasar pada tahun 2025 antara lain: hiu, pari, ikan capungan banggai (*Banggai Cardinal Fish*), teripang, *soft coral*, arwana, dan sidat.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2025

Capaian kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan 20% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Pada tahun 2024 dari target 5 jenis tercapai 6 jenis (120%) dan pada tahun 2025 dari target 5 jenis tercapai 7 jenis (140%). Kenaikan capaian ini dikarenakan jumlah jenis yang dilayani oleh BPSPL Denpasar di tahun 2025 bertambah yaitu jenis sidat.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

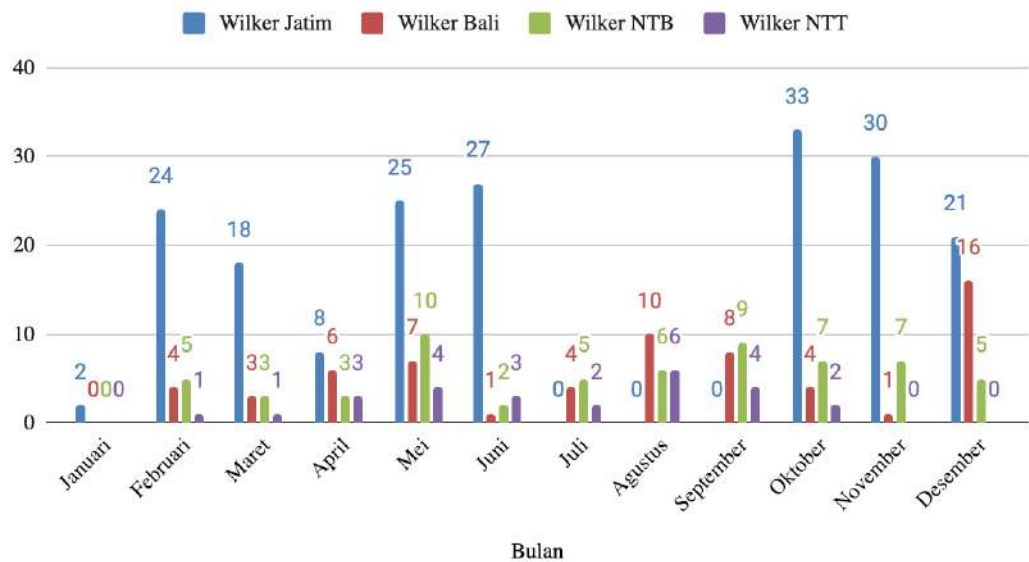
D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) adalah kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES. Pelaksanaan pelayanan jenis ikan dilakukan secara daring dan luring. Adapun rincian jenis ikan yang dilayani oleh BPSPL Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

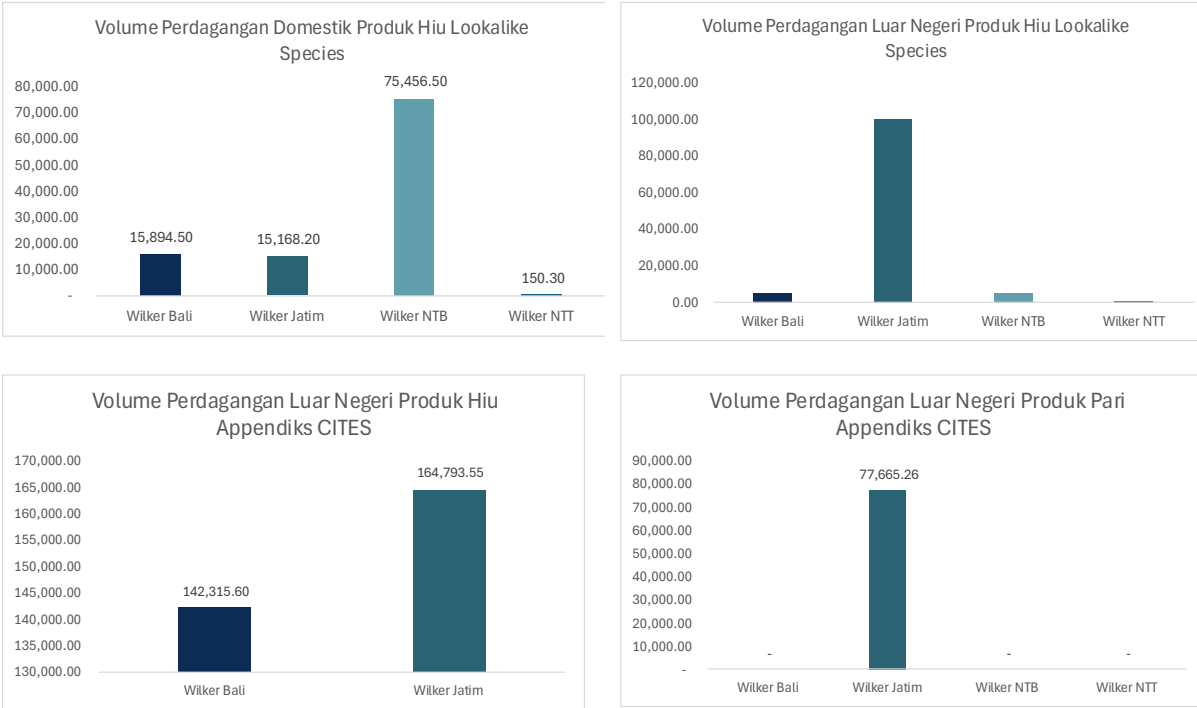
1. Hiu

BPSPL Denpasar melakukan penerbitan dokumen lalu lintas jenis ikan berupa SAJI DN hiu dan pari. Adapun dokumen lalu lintas terbit tersaji pada Gambar.

SAJI DN Jenis Hiu dan Pari



Gambar 7. Dokumen SAJI DN Hiu dan Pari Terbit Tahun 2025



Gambar 8. Perdagangan Hiu BPSPL Denpasar Tahun 2025

2. Pari

BPSPL Denpasar melakukan penerbitan dokumen lalu lintas jenis ikan berupa SAJI DN hiu dan pari. Penerbitan dokumen lalu lintas SAJI DN berada di wilayah kerja Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun volume perdagangan jenis pari di BPSPL Denpasar Tahun 2025 tersaji pada Gambar.

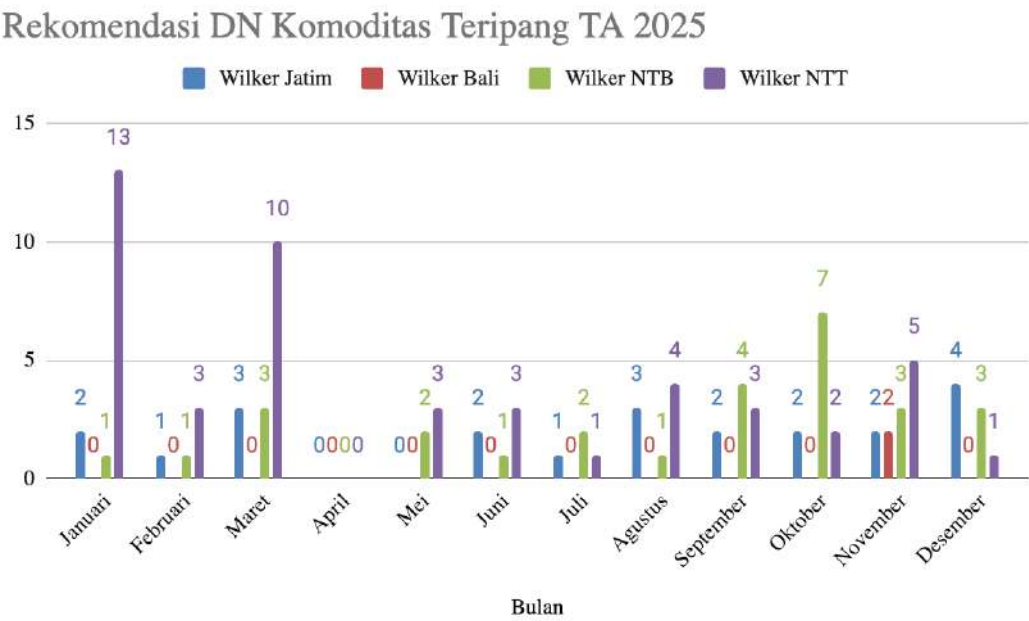


BPSPD Denpasar melakukan penerbitan dokumen lalu lintas jenis ikan capungan banggai selama tahun 2025. Rincian penerbitan SAJI DN arwana tersaji pada Gambar 7.



4. Teripang

BPSPL Denpasar melakukan penerbitan dokumen lalu lintas jenis teripang berupa rekomendasi baik dalam negeri maupun luar negeri dengan rincian sebagaimana tersaji pada Gambar.



Gambar 11. Dokumen Rekomendasi DN Teripang Terbit Tahun 2025

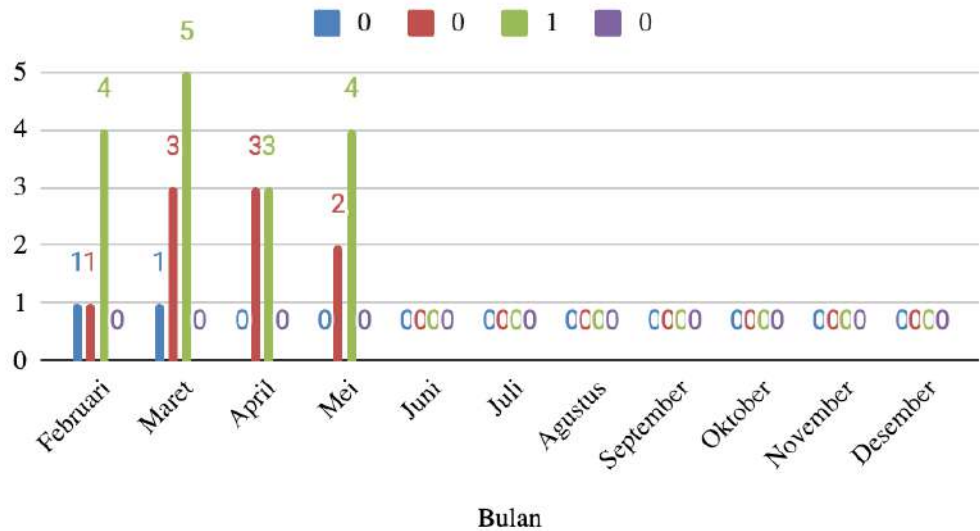


Gambar 12. Dokumen Rekomendasi LN Teripang Terbit Tahun 2025

5. Soft Coral

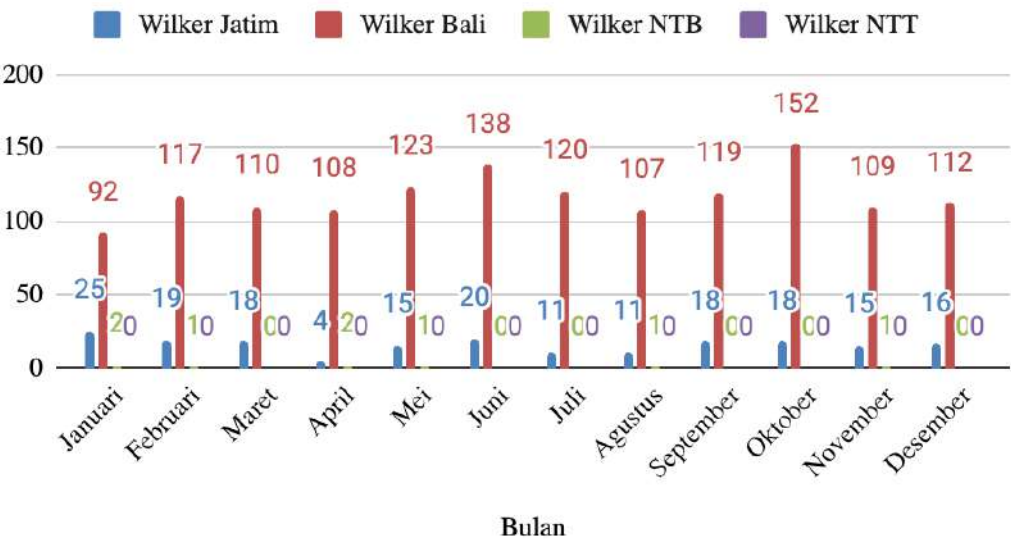
BPSPL Denpasar melakukan penerbitan dokumen lalu lintas jenis karang hias (Soft Coral, Anemone, dan Artificial Live Rock) sebagaimana tersaji pada Gambar.

Penerbitan Rekomendasi DN Karang



Gambar 13. Dokumen Rekomendasi SAA Terbit Tahun 2025

Penerbitan Rekomendasi LN Karang



Gambar 14. Dokumen Rekomendasi SAA Terbit Tahun 2025

6. Arwana

BPSPL Denpasar melakukan penerbitan dokumen lalu lintas jenis arwana selama tahun 2025 telah terbit 38 dokumen SAJI DN. Rincian penerbitan SAJI DN arwana tersaji pada Gambar.

kerja BPSPL Denpasar. Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, SOP Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko mekanisme Hak Akses Turunan, Nomor 09/DJPRL.2/OT.310/IX/2022 tanggal 28 Agustus 2022, dan juga SOP yang dikeluarkan BPSPL Denpasar B.3048/BPSPL.4/OT.3/VII/2025 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lapang Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan. Kegiatan ini dilaksana sepanjang tahun 2025 berdasarkan permohonan dari pelaku usaha. Adapun pelaku usaha yang memohonkan pemeriksaan lapang atas permohonan penerbitan SIPJI di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

2. Verifikasi Stok Opname Bulanan dan Stok Masuk Pengambilan Alam untuk Pelaku Usaha Pemegang SIPJI

Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulannya untuk seluruh pemegang SIPJI di wilayah kerja BPSPL Denpasar. Pemeriksaan stok opname dilakukan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor 5 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Stok Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks II CITES Hasil Pengambilan Dari Alam, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Ii *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*.

3. Forum Konsultasi Publik dan Review Pelayanan Publik BPSPL Denpasar telah dilaksanakan tanggal 14 Juli 2025
4. Telah dilaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan Jenis Ikan untuk Pelaku Usaha Hiu, Pari dan Arwana (28 Juli 2025)
5. Bimbingan Teknis Identifikasi SIBERANG (Sidat, Belida, dan Teripang) di Surabaya tanggal 5-6 Agustus 2025
6. Bimtek Teknis Peningkatan kapasitas petugas layanan - Bimtek Identifikasi Koral, Kuda laut, dan napoleon di bali (9-11 september 2025)
7. Survey Potensi dan Pendataan Kuota Teripang dan Koral di Provinsi Bali (1-3 September 2025)
8. Bimbingan Teknis Penanganan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Terancam Punah (Buaya) (4 Desember 2025)
9. Penyadartahuan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Terancam Punah di Provinsi Jawa Timur (Sosialisasi Penyu) (11-13 Desember 2025)

- | | |
|---|---|
|  | EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | <p>Eselon I : Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK)</p> <p>Nama Unit Lokus : Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSP/L) Denpasar</p> |

2. Irfan Hadi Nursanto, S.E

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berkompetensi,
Beriman, Berkeadilan, Berkeadilan

- Sewa kantor / gerai pelayanan di Denpasar, Surabaya, Mataram, Gorontalo, Mamuju, Makassar, Palu, dan Kendari
- Pengadaan peralatan identifikasi berupa 1 unit mikroskop digital set
- Pengadaan peralatan pelayanan berupa 5 unit printer scanner, 2 unit scanner, 1 unit AC standing 3 PK, 3 unit AC split 2 PK, 20 alat pengolah data, 3 unit Webcam ptz VC, 2 unit LCD proyektor, 4 unit TV, 1 unit microwave, 7 unit smart tab, 2 unit smart phone, 1 unit kamera digital, 3 unit kamera aksi, 2 unit drone, 5 set alat selam
- Pengadaan peralatan respon cepat berupa 6 unit kandang karantina dan 4 unit kendaraan fungsional
- Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan berupa meja dan kursi ruang pelayanan

Tabel 14. Dokumentasi IK Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)



Forum Konsultasi Publik dan Rvwview Pelayanan Publik



Bimbingan Teknis Sidat, Belida, dan Teripang





IK 4. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)

Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik merupakan nilai terendah yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik.

- a. Jenis Ikan dilindungi berdasarkan ketentuan nasional (Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas);
- b. Jenis ikan masuk dalam Apendiks CITES;
- c. Jenis ikan yang masuk dalam daftar Jenis Asing Invasif (JAI): dan
- d. Jenis Ikan yang masuk dalam daftar Sumber Daya Genetik.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari SAJI-DN, Rekomendasi, SKM dan penerapan konvensi).

Tabel 15. Capaian IK 5 BPSPL Denpasar

SK 4	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar					
IK 5	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	80	90	112	100	80	112

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai) tercapai Nilai 90 dari target 80 (112%). Capaian ini diperoleh atas penilaian mandiri terhadap kinerja pelayanan perizinan. Penilaian terdiri dari aspek proses penerbitan SAJI DN, proses penerbitan Rekomendasi, Survey Kepuasan Masyarakat, dan penerapan konvensi.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 karena indikator kinerja tidak terdapat pada tahun 2025.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- a. Analisis Keberhasilan



Gambar 18. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat BPSPL Denpasar Tahun 2025

IK 5. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)

Dokumen Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil merupakan dokumen pengumpulan data pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup 3 (tiga) hal sebagai berikut: Jumlah pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; Data perizinan pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; dan Data tumpang tindih kewenangan dalam

pemberian perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menjumlahkan dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 17. Capaian IK 5 BPSPL Denpasar

SK 5	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar					
IK 5	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	1	1	100	100	1	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) tercapai 1 dokumen dari target 1 dokumen (100%). Dalam dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, capaian pada tahun 2025 telah teridentifikasi 15 pulau yaitu 7 pulau di Kabupaten Manggarai Barat, 3 pulau di Kabupaten Alor, 2 pulau di Kabupaten Rote Ndao, dan 3 pulau di Kabupaten Lombok Barat. Terdapat 41 pelaku usaha yang memanfaatkan pulau – pulau kecil dan perairan sekitarnya; dan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak sejumlah Rp4.142.953.329,-

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat target indikator kinerja yang sama.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) antara lain telah dilaksanakan identifikasi perijinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di lokasi sebagai berikut :

- Kabupaten Lombok Barat pada 27 Juli - 2 Agustus 2025:

1. Gili Asahan
2. Gili Gede
3. Gili Layar
4. Gili Nanggu
5. Gili Sudak
6. Gili Kedis
7. Gili Lontar

- Kabupaten Manggarai Barat pada 13-17 Agustus 2025:

1. Pulau Bidadari
2. Pulau Siwona
3. Pulau Sabolo Besar
4. Pulau Seraya Kecil
5. Pulau Pungu
6. Pulau Sebayur
7. Pulau Kanawa

- Kabupaten Rote Ndao pada 11-17 Agustus 2025:

1. Pulau Rote
2. Pulau Landu

- Kabupaten Alor pada 8-12 Desember 2025:

1. Pulau Padar
2. Pulau Pura
3. Pulau Kepa

Adapun dari 19 pulau tersebut telah dilakukan tindak lanjut dan teridentifikasi 15 pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang dilakukan pemanfaatan oleh pelaku usaha. Pulau-pulau tersebut antara lain 7 pulau di Kabupaten Manggarai Barat yaitu Pulau Bidadari, Pulau Siwona, Pulau Seraya Kecil, Pulau Sabolo Besar, Pulau Pungu, Pulau Sebayur, dan Pulau Kanawa; 3 pulau di Kabupaten Alor yaitu Pulau Padar, Pulau Pura dan Pulau Kepa; 2 pulau di Kabupaten Rote Ndao yaitu Pulau Rote dan Pulau Landu; dan 3 pulau di Kabupaten Lombok Barat yaitu Gili Asahan, Gili Gede, Gili Nanggu.






A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) tercapai 2 dokumen dari target 2 dokumen (100%). Dua dokumen tersebut diperoleh dari kegiatan verifikasi pemanfaatan ruang laut dan monitoring pemanfaatan ruang laut. Verifikasi ruang laut dilakukan dengan menghadiri verifikasi/penilaian teknis permohonan KKPRRL sejumlah 176 permohonan dan melakukan verifikasi/penilaian teknis permohonan KKPRRL sejumlah 122 permohonan yang dilaksanakan oleh BPSPL Denpasar.

Monitoring pemanfaatan ruang laut dilakukan dengan kegiatan finalisasi penilaian pelaksanaan KKPRRL di wilayah kerja BPSPL Denpasar dengan hasil 31 KKPRRL Terbit yang dilakukan penilaian pelaksanaan dengan keterangan 1 KKPRRL terbit berstatus taat dengan catatan, 3 KKPRRL terbit berstatus tidak taat, dan 27 KKPRRL terbit berstatus taat dalam renaksi penilaian pelaksanaan KKPRRL tahun 2025 terdapat 28 target dokumen KKPRRL terbit yang dilaksanakan Penilaian Pelaksanaan KKPRRL. Telah dilakukan identifikasi pemanfaatan ruang laut sebanyak 439 subjek hukum pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Lombok Timur, berupa Keramba Jaring Apung.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 tercapai 100% (target 2 dokumen dan capaian 2 dokumen), sedangkan capaian kinerja tahun 2024 target 3 dokumen tercapai 3 dokumen (100%). Hal terdapat capaian yang sama yaitu 100% dari target sehingga tidak ada perbedaan. Adapun perbedaan hanya pada jumlah target, namun kegiatan yang dilaksanakan tetap berjalan dan memenuhi target di tahun berjalan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**a. Analisis Keberhasilan**

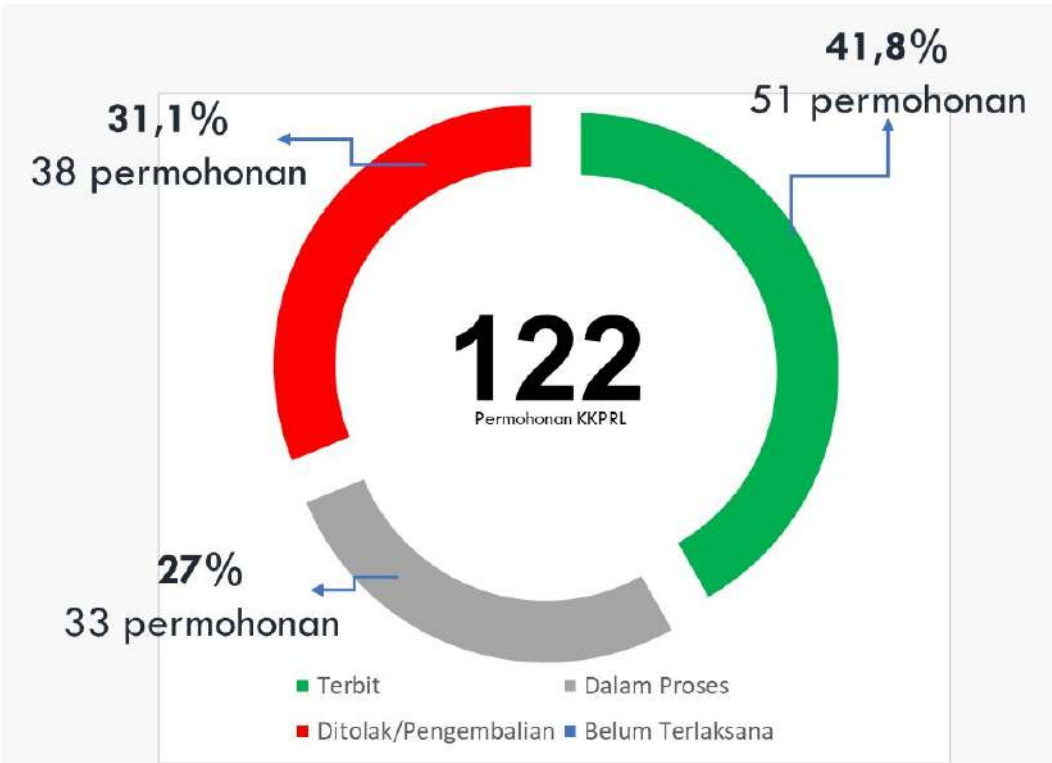
Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

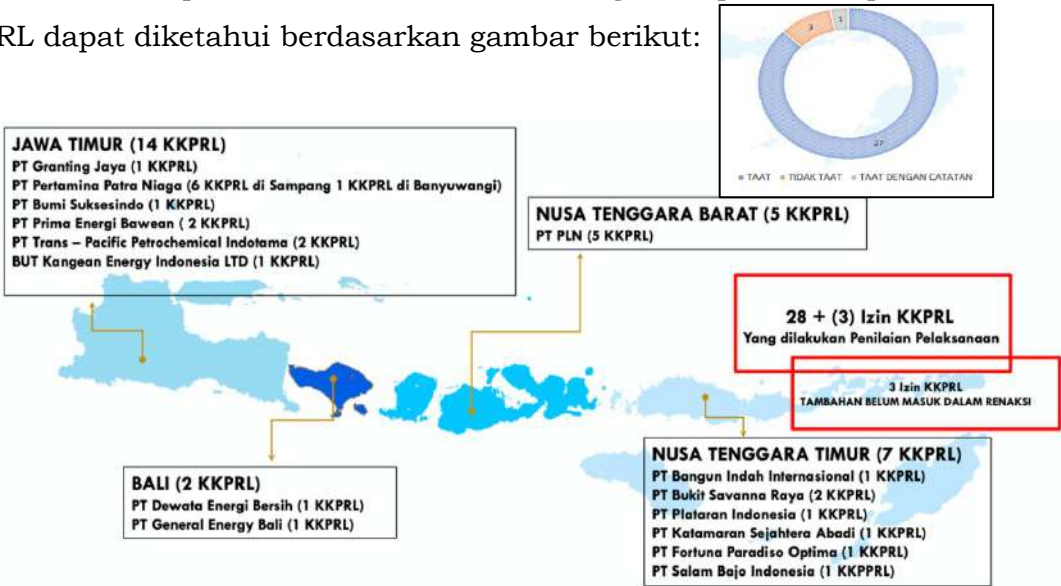
- a. Menghadiri undangan verifikasi/penilaian teknis permohonan KKPRL sejumlah 176 permohonan yang dilaksanakan oleh Ditjen PRL
- b. Melakukan verifikasi/penilaian teknis permohonan KKPRL sejumlah 122 permohonan yang dilaksanakan oleh BPSPL Denpasar



Gambar 20. Kegiatan Verifikasi Penilaian Teknis Permohonan KKPRL oleh BPSPL Denpasar Tahun 2025

2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

Terdapat 31 Izin KKPRL yang telah dilakukan kegiatan penilaian pelaksanaan oleh BPSPL Denpasar. Rincian hasil dari kegiatan penilaian pelaksanaan KKPRL dapat diketahui berdasarkan gambar berikut:



Gambar 21. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian KKPRL BPSPL Denpasar Tahun 2025

Dari 31 Izin KKPR yang telah dilaksanakan kegiatan penilaian pelaksanaan, diketahui bahwa terdapat 27 Izin KKPR dengan kategori Taat, 3 Izin KKPR dengan kategori Tidak Taat, dan 1 Izin KKPR dengan kategori Taat Dengan Catatan. Penyebab dari 3 Izin KKPR yang dikategorikan sebagai pemegang izin KKPR yang tidak taat adalah tidak terdapat adanya pemenuhan izin pasca terbit izin KKPR serta ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan dalam proposal permohonan.

3. **Sosialisasi Kesesuaian dan Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut**
Kegiatan Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut telah terlaksana di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk menghimbau pelaku usaha yang belum memiliki Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk segera memohonkan izin pada aplikasi Online Single Submission (OSS).

Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi adalah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dalam Penataan Ruang Laut, Implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut pada Penataan Ruang Laut, Asistensi Tata Cara Permohonan Pada Aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Asistensi Tata Cara Penyusunan Dokumen Proposal (Gerei Sahabat Layanan).

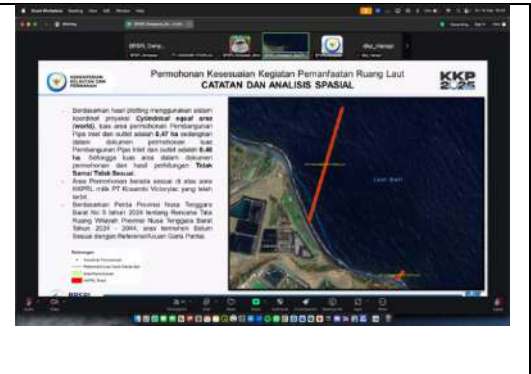
Tabel 19. Pelaksanaan Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Nama Kegiatan
22 Juli 2025	Hotel Banyu Alit Buleleng	Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
23 Juli 2025	Hotel Banyu Alit Buleleng	Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
29 Juli 2025	Hotel Lombok Astoria, Kota Mataram	Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
30 Juli 2025	Hotel Lombok Astoria, Kota Mataram	Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Nama Kegiatan
20 Agustus 2025	Hotel La Prima, Labuan Bajo	Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
2 September 2025	Four Points by Sheraton, Kota Surabaya	Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Tabel 20. Dokumentasi Kegiatan Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar





Verifikasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut



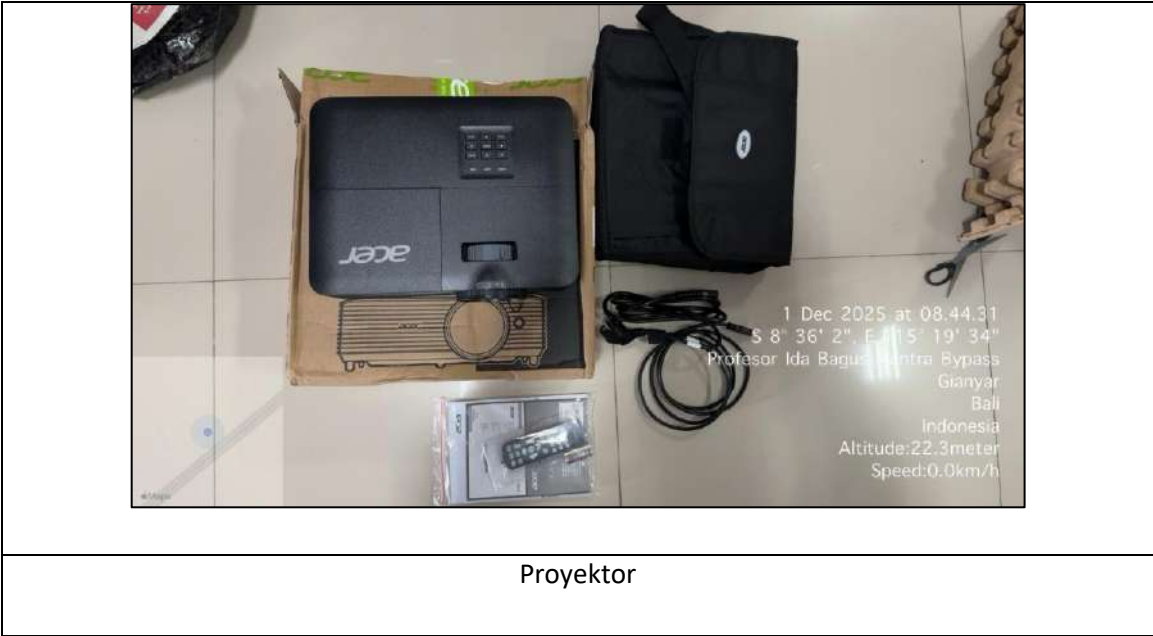






Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

 Dec 2025 at 13:06:01 8°36'2" S, 115°19'33" E Profesor Ida Bagus Mantra Bypass Gianyar Bali	 71 Dec 2025 at 13:35:48 8°36'2" S, 115°19'33" E Profesor Ida Bagus Mantra Bypass Gianyar Bali
Smart Tab	Smart Phone
 Dec 20, 2025 11:16:52 8°36'3.04"S 115°19'33.371"E Pering Blahbatuh Gianyar Regency Bali	 1 Dec 2025 at 08:38:19 8°36'2" S, 115°19'33" E Profesor Ida Bagus Mantra Bypass Gianyar Bali Indonesia Altitude: 22.0meters Speed: 0.3km/h
Smart Tab	Alat Conference
 8°36'2.553"S 115°19'33.312"E Pering Blahbatuh Gianyar Regency Bali Network: Dec 3, 2025 11:43:36 AM GMT+08:00 Local: Dec 3, 2025 11:43:37 AM GMT+08:00	 8°36'2.632"S 115°19'33.333"E Pering Blahbatuh Gianyar Regency Bali Network: Dec 3, 2025 11:43:14 AM GMT+08:00 Local: Dec 3, 2025 11:43:15 AM GMT+08:00
Printer	Scanner



Proyektor

IK 7. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP BPSPL Denpasar dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BPSPL Denpasar merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkup BPSPL Denpasar. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Mitra Unit Organisasi Eselon I atau Sekretariat Ditjen PKRL. Data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat Ditjen PKRL.

Kategori dan Predikat nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan

Predikat	Nilai	Interpretasi
		Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup

demikian capaian kinerja Tahun 2025 terhadap tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar 18%. Adanya kenaikan tersebut dikarenakan perbedaan target dan nilai PM SAKIP yang meningkat pada tahun berjalan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target nilai PM SAKIP BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

- Layanan Perencanaan Program dan Anggaran
 - a. Revisi POK 1 pada Bulan Januari untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
 - b. Revisi Pemutakhiran KPA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
 - c. Revisi DIPA Efisiensi Anggaran dan RPD tanggal 24 Februari 2025
 - d. Revisi anggaran berupa relaksasi blokir efisiensi anggaran Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yaitu penghapusan blokir kode A dan pencantuman blokir kode 2 tanggal 10 April 2025
 - e. Revisi anggaran pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2025 dan Revisi POK Satker tanggal 24 April 2025
 - f. Penyampaian usulan revisi DIPA dalam rangka buka blokir anggaran pada sumber dana PNBPN sebesar Rp. 2.075.000.000,- pada tanggal 26 Mei 2025
 - g. Pengesahan revisi DIPA berupa penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA dalam rangka buka blokir anggaran pada sumber dana PNBPN sebesar Rp. 2.075.000.000,- pada tanggal 17 Juni 2025 sesuai surat dari Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran, Kemenkeu nomor S-531/AG/AG.3/2025 tanggal 17 Juni 2025
 - h. Pengisian Kertas Kerja Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan II Tahun 2025 sesuai permohonan data dari Kanwil DJPB Provinsi Bali
 - i. Revisi anggaran pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan III Tahun 2025 dan Revisi POK Satker tanggal 15 Juli 2025
 - j. Penyusunan dan Reviu Dokumen Anggaran Pagu Indikatif Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan TA 2026 secara daring tanggal 15-16 Juli 2025
 - k. Revisi DIPA perubahan kantor bayar tanggal 19 Agustus 2025
 - l. Revisi DIPA Pemutakhiran KPA tanggal 21 Agustus 2025

- m. Pengisian Kertas Kerja Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan III Tahun 2025 sesuai permohonan data dari Kanwil DJPB Provinsi Bali
- n. Reviu Dokumen Usulan Penambahan Pagu Penggunaan Dana PNPB TA 2025 tanggal 12-14 Agustus 2025
- o. Penyusunan dan Reviu Dokumen Pagu Anggaran Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan TA 2026 tanggal 2-4 Agustus 2025
- p. Reviu Rekomposisi Usulan Tambahan Izin Penggunaan PNPB Tahun 2025 tanggal 10-11 September 2025
- q. Revisi Pemutakhiran KPA tanggal 9 Desember 2025
- r. Revisi Pemutakhiran KPA tanggal 12 Desember 2025
- s. Revisi Satker/POK tanggal 31 Desember 2025
- t. Kegiatan Perencanaan KAK kegiatan pengelolaan KK Gili Matra tanggal 22-24 Desember 2025 di Sidoarjo
- Layanan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Penyusunan dan pembahasan dokumen kinerja tahun 2025
 - b. Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025
 - c. menyusun draft manual IKU, rincian target, rencana aksi BPSPL Denpasar pasca perjanjian kinerja revisi
 - d. melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi rencana aksi lingkup DJPK
 - e. pengisian aplikasi Kinerjaku
 - f. melaksanakan verifikasi kinerja aplikasi e-Monev Bappenas
 - g. melaksanakan Penilaian Mandiri SAKIP

IK 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)

Masyarakat di kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Formula Perhitungan:

Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^7$ (Nilai Indikator $n \times$ Bobot Indikator n) : Konversi Bobot – Dispensasi SPM

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 23. Capaian IK 7 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
99,47	89	94,11	105	-1	89	105

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) nilai 94,11 dari target 89 (105%). Penilaian indikator kinerja ini meliputi kualitas perencanaan anggaran (revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA), kualitas pelaksanaan anggaran (penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP), dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (capaian output). Kegiatan pendukung pada indikator kinerja ini adalah kegiatan pengelolaan keuangan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 yang memiliki target 93,76 capain 99,47 (106%) terdapat penurunan 1%. Adanya penurunan ini dikarenakan beberapa faktor antara lain: perbedaan target tahunan, belanja kontraktual seharusnya dilaksanakan sebelum Triwulan III dan baru dilaksanakan pada Triwulan IV sehingga nilai tidak maksimal, dampak dari efisiensi mempengaruhi pengelolaan UP dan TUP, dan penyerapan anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

- Rekonsiliasi LPJ Satker dengan KPPN Denpasar
- Rekonsiliasi Penerimaan Negara Satker dengan KPPN Denpasar
- Rekonsiliasi Rekening Satker dengan KPPN Denpasar
- Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN Denpasar

IK 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu.

Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1. Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1. Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap

menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK \text{ dalam PMK}} + \sum RO_{\text{memenuhi kriteria SBKU}}} \right) \times 100\%$$

2. Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satker

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

- Layanan BMN
 - a. Melakukan Inventarisasi Kondisi Eksisting BMN
 - b. Menyiapkan Dokumen Usulan Penghapusan BMN dalam kondisi rusak berat
 - c. Melakukan proses usulan Penghapusan BMN pada aplikasi Siman Versi 2 pada modul pengelolaan secara berjenjang melalui tingkat Eselon, Telah dilakukan pemutakhiran data validasi BMN berupa tanah pemerintah serta telah dilakukan proses usulan pendaftaran asuransi BMN berupa sarana dan prasarana gedung bangunan kantor
 - d. Melakukan Pemutakhiran Data Aset pada Siman versi 2
 - e. Melakukan transaksi pencatatan BMN berupa perubahan kondisi barang, pengehentian penggunaan BMN dari penggunaan
 - f. Melakukan pencatatan transaksi barang persediaan
 - g. Melaksanakan Penyusunan Laporan BMN tingkat Satker
 - h. Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat Eselon I
 - i. Melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan dan Laporan BMN dengan Inspektorat I KKP
 - j. Melaksanakan Lelang BMN
 - k. Melakukan Inventarisasi Rumah Negara
 - l. - Melakukan pencatatan perekaman pembelian belanja modal
 - m. Menyusun Laporan BMN periode Tahun 2025
 - n. Menyiapkan dokumen usulan hibah BMN dari BPSPL Denpasar kepada UPTD Alor
- Layanan rumah tangga; Penyelenggaraan layanan kerumahtanggaan untuk menunjang TUSI BPSPL Denpasar
- Layanan perkantoran
 - a. Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan sesuai ketentuan
 - b. Pembayaran rutin operasional dan pemeliharaan kantor sesuai perencanaan

IK 10. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah

Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025:

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 25. Capaian IK 9 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 9	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
4	4	4	100	-	4	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) tercapai 4 dokumen dari target 4 dokumen (100%). Capaian 4 laporan SPIP yaitu laporan SPIP TW IV Tahun 2024, laporan SPIP TW I Tahun 2025, laporan SPIP TW II Tahun 2025, dan laporan SPIP TW III Tahun 2025 yang merupakan capaian dari target IK ini pada Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja pada Tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024. Capaian kinerja tersebut sama sama tercapai 100%.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) adalah telah dilakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP TW IV Tahun 2024, Laporan SPIP TW I Tahun 2025, Laporan SPIP TW II Tahun 2025, dan Laporan SPIP TW III Tahun 2025.

IK 11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$
$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$
$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$
$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

- Keterangan:
- IP = Indeks Profesionalisme
 - IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i
 - IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
 - IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
 - IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
 - IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

- W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j
- W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k
- W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l
- W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Tabel 26. Capaian IK 11 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
91,36	80	86,85	108	4	80	108

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks) tercapai 86,85 dari target 80 (108%). Capaian indikator kinerja ini melalui kegiatan layanan SDM dengan masing-masing pegawai menginput sertifikat pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar dan workshop ke aplikasi myasn digital.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian 91,36 dari target 88 (104%) memiliki kenaikan sejumlah 4% dengan tahun 2024. Peningkatan tersebut dikarenakan perbedaan target pada tahun berjalan selain itu koordinasi antar pegawai lebih baik dalam mengupload dan menginput sertifikat pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar dan workshop.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**a. Analisis Keberhasilan**

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target indeks profesionalitas (IP ASN) lingkup BPSPL Denpasar. Kegiatan sejauh ini mengalami lebih banyak keberhasilan karena pelaksanaan kegiatan manajemen SDM secara rutin yang baik oleh koordinator kegiatan dan kerjasama yang baik dari staf pelaksana kegiatan dalam penyusunan SKP.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks) adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja ASN BPSPL Denpasar Triwulan IV dan Periode Final Tahun Anggaran 2024, Triwulan I Tahun 2025, Triwulan II Tahun 2025, dan Triwulan III Tahun 2025
2. Pengusulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK
3. Pengusulan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional
4. Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode Tahun 2025
5. Pengusulan Satyalencana Karya Satya X Tahun dan XX Tahun
6. Menyiapkan dan melaksanakan Dialog Kinerja BPSPL Denpasar
7. Pengusulan Rencana Tugas Belajar Tahun 2025
8. Pengusulan Penataan Jabatan Fungsional Umum Lingkup BPSPL Denpasar
9. Menyiapkan kegiatan olahraga senam bersama selama Tahun 2025
10. Menyiapkan usulan ujian kompetensi Jabatan fungsional Kepegawaian

11. Menyiapkan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
12. Menyiapkan Pemetaan Jabatan Penata Laksana Barang lingkup BPSPL Denpasar
13. Pengusulan mengikuti Uji Kompetensi untuk Jabatan Fungsional Non KKP
14. Komitmen Kepesertaan JKN Tahun 2026 Bagi PNP/Non ASN dan PPPK Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya
15. Menyiapkan fasilitas untuk mendukung peningkatan kompetensi bagi pegawai yang akan mengikuti Penilaian Kompetensi untuk kenaikan jabatan Fungsional atau Jabatan Struktural berupa penyediaan Buku Pembelajaran Psikotes dan e-book tentang Manajerial, Sosial, Kultural.

IK 12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPKRL sampai dengan waktu pengukuran.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti BPSPL Denpasar}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPSPL Denpasar}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jika tidak ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100.
2. Jika ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.

Tabel 27. Capaian IK 12 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian	Target TW IV	Capaian TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
100	95	87	91,58	--33,42	95	91,58

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) pada Triwulan

IV Tahun 2025 tercapai 87% dari target 95% (91,58%). Presentase capaian dapat dilihat pada aplikasi SIDAK.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 terdapat penurunan capaian sejumlah 33,42% dari tahun 2024. Adapun perbandingan capaian tersebut dikarenakan belum ditindaklanjutnya catatan pada aplikasi SIDAK di Tahun 2025

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Kegagalan

Pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat hasil catatan pengawasan APIP terkait uji substansi pemantauan kegiatan proyek PHLN LAUTRA Tahun Anggaran 2025

b. Solusi

Solusi dari analisis kegagalan adalah dilakukan tindak lanjut catatan pada aplikasi SIDAK pada Triwulan I Tahun 2026

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (BPSPL Denpasar) tanggal 19-25 Januari 2025 oleh Inspektorat Jenderal KKP
2. Menyiapkan dokumen tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi
3. Melakukan upload dokumen tindaklanjut pada Aplikasi SIDAK KKP
4. Seluruh Temuan APIP atas audit Pertanggungjawaban LAUTRA telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sampai dengan terbitnya Berita Acara Tindak Lanjut
5. Seluruh Temuan APIP atas audit Pertanggungjawaban LAUTRA telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sampai dengan terbitnya Berita Acara Tindak Lanjut
6. Terdapat Hasil Catatan Pengawasan APIP terkait Uji Substansi Pemantauan Kegiatan Proyek PHLN LAUTRA TA 2025

IK 13. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar(%)

Temuan LHP BPK BPSPL Denpasar yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSPL Denpasar Tahun 2025.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Denpasar yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Denpasar}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Tabel 28. Capaian IK 13 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 13	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
100	100	100	100	-	100	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%) tercapai 100 dari target 100 (100%). BPSPL Denpasar tidak terdapat temuan LHP BPK RI atas LK KKP TA.2024 sehingga capaian tercapai 100%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sama sama tercapai 100% sehingga tidak terdapat kenaikan atau penurunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

b. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar dan sampai dengan akhir Tahun 2025 belum terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti.

D. Kegiatan Pendukung

Telah melakukan Tindak Lanjut atas temuan BPK RI pada pertanggungjawaban keuangan kegiatan LAUTRA tahun 2024 dan sampai dengan akhir tahun 2025 belum terdapat pemeriksaan BPK RI Tahun 2025.

IK 14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit.

Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Formulasi perhitungan yaitu dengan Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya.

Tabel 29. Capaian IK 14 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
87,57	75	87,57	117	-	75	117

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai) tercapai nilai 87,57 dari target 75 (117%). Adapun kegiatan pendukung pada indikator kinerja ini adalah kegiatan Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan capaian yang sama yaitu nilai 87,57 dari target 75 (117%) sehingga capaian sama tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar. Pelaksanaan kegiatan sejauh ini dilakukan kerjasama yang baik dari koordinator-koordinator kegiatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan WBK secara bertahap.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IK Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan tim kerja
2. Rapat Evaluasi dan Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

IK 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

- Pengawasan sistem kearsipan internal
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.
- Pengawasan pengelolaan arsip aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

- Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Denpasar akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI yang mencakup aspek pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - penciptaan arsip (25%)
 - penggunaan arsip (25%)
 - pemeliharaan arsip (25%)
 - penyusutan arsip (25%)
2. Sumber Daya Kearsipan (bobot 50%)
 - sumber daya manusia kearsipan (50%)
 - prasarana dan sarana (50%)
3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	> 90 – 100
A	Memuaskan	> 80 – 90
BB	Sangat Baik	> 70 – 80
B	Baik	> 60 – 70
CC	Cukup	> 50 – 60
C	Kurang	> 30 – 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 30. Capaian IK 15 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
98,80	80	86,11	108	-33	80	108

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai) tercapai 86,11 dari target 80 (108%). Kegiatan pada indikator kinerja ini adalah layanan persuratan, tata usaha, dan kearsipan secara rutin.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu dengan capaian 98,80 dari terget 70 (141%) terdapat penurunan capaian sejumlah 33% hal tersebut dikarenakan perbedaan target pada tahun berjalan, perbedaan indikator/komponen penilaian yaitu SDM kearsipan di BPSPL Denpasar belum memiliki sertifikasi kearsipan. Namun, target pada Tahun 2025 tetap terpenuhi yaitu 108%.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**a. Analisis Keberhasilan**

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar. Faktor keberhasilan dengan memahami dan menerapkan standar persuratan dan kearsipan. Memastikan semua dokumen sesuai standar yang ada. Selain itu adanya kedisiplinan, dukungan dan kerjasama serta kolaborasi seluruh tim dalam pelaksanaan kegiatan persuratan dan pengarsipan. Serta mengontrol segala persuratan dan pengarsipan yang ada dalam lingkup BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai) adalah melaksanakan layanan persuratan, tata usaha, dan kearsipan secara rutin.

IK 16. Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)

Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%) .

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan target setiap triwulan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan revisi Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan Revisi POK 1 yang telah disahkan
- Telah dilaksanakan penyiapan bahan untuk revisi rencana umum pengadaan sesuai revisi DIPA 2 dalam rangka efisiensi anggaran
- Revisi Rencana Umum Pengadaan pasca efisiensi anggaran
- Pengisian kertas kerja data RUP pasca efisiensi anggaran
- Telah dilaksanakan penyiapan bahan untuk revisi rencana umum pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIRUP
- Telah dilaksanakan penyiapan bahan serta pelaksanaan revisi rencana umum pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIRUP sesuai dengan revisi RKAKL terakhir. Adapun RUP tersebut telah diumumkan dan dipublikasikan sesuai ketentuan

IK 17. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.

Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023. Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu: Mengumumkan informasi publik; Menyediakan informasi publik; Sarana dan Prasarana; Kelembagaan; dan Digitalisasi.

Formula Perhitungan:

1. Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).
2. SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.
3. Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP.
4. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari penilaian SAQ yang diakses melalui ppid.kkp.go.id/pelikan.
5. Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

No.	Predikat	Interval Sektor
1	Informatif	90 – 100
2	Menuju Informatif	80 – 89,9
3	Cukup Informatif	60 – 79,9
4	Kurang Informatif	40 – 59,9
5	Tidak Informatif	< 39,9

Tabel 32. Capaian IK 17 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	91	100	110	100	91	110

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 25.PPID-KKP/XII/2025 tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar mendapatkan nilai 100 dari target 91 (capaian 110%). Pada Indikator Kinerja ini dilakukan kegiatan rutin layanan kehumasan yaitu dengan publikasi pada media sosial BPSPL Denpasar dengan jumlah 150 postingan sepanjang tahun 2025. Berkenaan dengan hal tersebut BPSPL Denpasar juga telah mendapat penghargaan sebagai unit organisasi berpredikat Informatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian dan Perikanan Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024 karena pada tahun 2024 tidak terdapat Indikator Kinerja yang sama.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

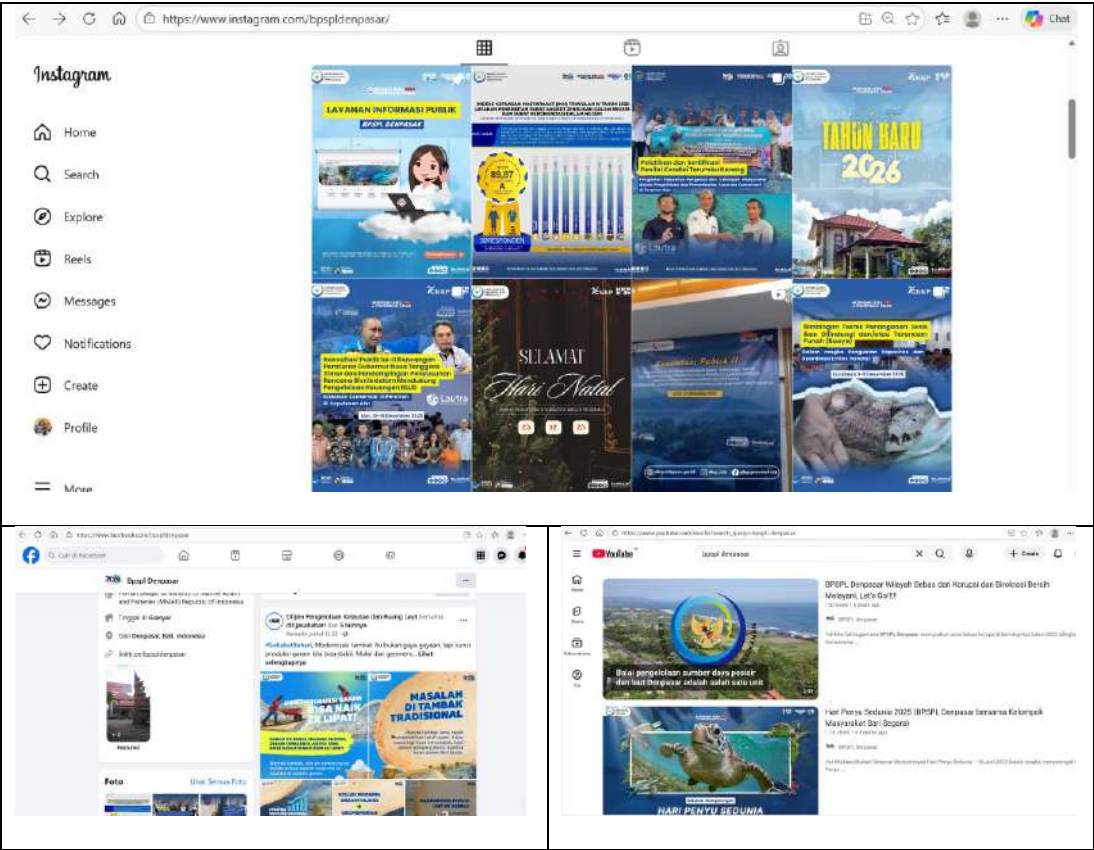
b. Analisis Keberhasilan

Kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan serta tim dalam mencapai target Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) adalah melaksanakan publikasi kegiatan secara rutin sebanyak 150 postingan kegiatan sepanjang Tahun 2025. Postingan telah dipublikasi melalui akun media sosial BPSPL Denpasar yang terdiri dari media sosial

instagram, facebook, X, dan Youtube. Adapun beberapa dokumentasi publikasi yang telah dilakukan tersaji pada Gambar berikut.



Tabel 33 . Media Publikasi BPSPL Denpasar

3.4 Tindak Lanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang tertuang pada Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.3744/DJPK.1/RC.610/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada BPSPL Denpasar telah diperoleh Nilai Hasil Penilaian APIP BPSPL Denpasar Tahun 2025 adalah 86,90 dengan predikat penilaian A. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut tidak ditemukan kelemahan pada pelaksanaan SAKIP Tahun 2025 namun dengan adanya penambahan anggaran PNBPN sebesar Rp103,145 miliar (optimasi persetujuan PNBPN dari 10% menjadi 23%) melalui revisi DIPA TA 2025 tanggal 31 Oktober 2025 terjadi perubahan signifikan dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan perizinan dan dukungan PNBPN lingkup Ditrektorat Jenderal PKRL, yang seharusnya diikuti dengan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) level 2 Pusat dan UPT. BPSPL Denpasar direkomendasikan untuk menindaklanjuti perubahan anggaran tersebut dengan membuat memorandum usulan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

INDIKATOR KINERJA		BPSPL Denpasar s.d. Triwulan IV 2025			BPSPL Makassar s.d. Triwulan IV 2025		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
10	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4	4	100	4	4	100
11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	80	86,85	108,56	80	89,82	112,3
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)	95	87	91,58	95	100	105,26
13	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100	100	100	100	100	100
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai)	75	87,57	116,76	75	87,41	116,5
15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80	86,11	107,64	70	85	120
16	Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76	100	120	76	100	120
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	91	100	109,89	91	100	109,89

Dari hasil perbandingan terhadap dua indikator kinerja BPSPL Denpasar lebih unggul dari BPSPL Makassar pada indikator kinerja: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai); dan Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai). Hal tersebut dikarenakan nilai IKPA BPSPL Denpasar lebih unggul dari pada BPSPL Makassar penyerapan anggaran BPSPL Denpasar lebih optimal dibandingkan BPSPL Makassar. Begitu juga dengan nilai unit kinerja berpredikat menuju WBK BPSPL Denpasar sedikit lebih unggul dari pada BPSPL Makassar berdasar penilaian yang dilakukan oleh Itjen.

Terdapat tiga indikator kinerja yang telah sesuai target tetapi presentase kurang dari BPSPL Makassar antara lain indikator kinerja Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang), Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis), dan Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai). Pada tiga indikator tersebut BPSPL Denpasar telah mencapai target namun hanya kurang dari BPSPL Makassar. Terkait masyarakat yang ditingkatkan BPSPL Denpasar memiliki beberapa tahap dalam peningkatan kapasitas masyarakat. Untuk jenis keanekaragaman hayati perairan yang

dimanfaatkan adalah setiap UPT berbeda jenis layanan dan jenis produk yang dilayani. Sehingga capaian tidak dapat disamakan.

Terdapat satu indikator yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) BPSPL Denpasar lebih rendah dari pada BPSPL Makassar. Hal tersebut dikarenakan adanya catatan hasil pengawasan APIP pada aplikasi SIDAK yang belum ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2025. Terdapat satu indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai) BPSPL Denpasar lebih rendah dari BPSPL Makassar, namun hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena target berbeda dan penilaian yang dilakukan sama. Target BPSPL Denpasar tetap dari Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2025. Sedangkan 10 indikator lainnya capaian BPSPL Denpasar dan BPSPL Makassar sama yaitu telah mencapai target tahunan. Hal tersebut membuktikan bahwa BPSPL Denpasar dapat setara dengan UPT PSPL lainnya.



BAB IV

PRESTASI DAN KINERJA LAINNYA



BAB IV

PRESTASI DAN KINERJA LAINNYA

- Penghargaan Satker dengan Presentase Tertinggi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Tahun 2024 yang Diserahkan pada Bulan Januari 2025



- Piagam Penghargaan Atas Capaian Kinerja Organisasi Predikat Baik Triwulan IV Tahun 2024



- Piagam Penghargaan sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif



- LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
DENPASAR NOMOR : KEP-40/KPN.2201/2025
TANGGAL : 16 JANUARI 2025

NO	KODE BA	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA
2.	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
3.	029	400569	PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN LHK EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA

-

- Piagam Penghargaan atas Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan) yang diserahkan pada Juni 2025



- Satker dengan Penyelenggaraan Rekonsiliasi SAKTI Terbaik Periode Semester I Tahun 2025 lingkup Satker Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan





BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Capaian kinerja IKU BPSPL Denpasar hingga Triwulan III Tahun 2025 dinilai baik jika dilihat dari penilaian di aplikasi kinerjaku yaitu sebesar 109,47% dengan uraian sebagai berikut :

1. IK 1 Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi) 1 provinsi;
2. IK 2 Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang) 30 orang;
3. IK 3 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) 7 jenis;
4. IK 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai) Nilai 90;
5. IK 5 Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) 1 dokumen;
6. IK 6 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) 2 dokumen;
7. IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) Nilai 86,90;
8. IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) Nilai 94,11;
9. IK 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) Nilai 97,86;
10. IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) 4 dokumen;
11. IK 11 Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks) Nilai 86,85;
12. IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) 87%;
13. IK 13 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%) 100%;
14. IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai) dengan Nilai 87,57;
15. IK 15 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai) Nilai 86,11;
16. IK 16 Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar (%) 100%;
17. IK 17 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai) Nilai 100.

Capaian kinerja BPSPL Denpasar seluruhnya mendukung capaian Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

5.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja pada triwulan selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan pertemuan untuk evaluasi kegiatan Tahun 2025; dan
2. Menindaklanjuti catatan hasil pengawasan APIP Tahun 2025

5.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Sebelumnya

Telah diupayakan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada periode sebelumnya antara lain sebagai berikut:

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Tindak Lanjut
Melakukan revisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja kegiatan BPSPL Denpasar	Telah dilakukan revisi anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/1qrZ7uCjc0bR_1a9PXwwea9SOrfRXvBq?usp=drive_link
Melakukan koordinasi dengan Eselon I terkait status penerbitan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut	Telah dilakukan koordinasi	https://drive.google.com/drive/folders/13-wd5-88O9t7YWcg9_o-N3eCXlRCQR3H?usp=drive_link
Melakukan revisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja kegiatan BPSPL Denpasar	Telah dilakukan revisi anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/1qrZ7uCjc0bR_1a9PXwwea9SOrfRXvBq?usp=drive_link
Melakukan percepatan realisasi anggaran	Telah dilakukan percepatan realisasi anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/1jhMuHQCnmfKMBRIIbFLdO2Tom67uAMs1?usp=drive_link
Melakukan revisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja kegiatan BPSPL Denpasar	Telah dilakukan revisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja kegiatan BPSPL Denpasar	https://drive.google.com/drive/folders/1qrZ7uCjc0bR_1a9PXwwea9SOrfRXvBq?usp=drive_link

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Tindak Lanjut
Melakukan percepatan realisasi anggaran	Telah dilakukan percepatan realisasi anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/1jhMuHQCnmfKMBRIIbFLdO2Tom67uAMs1?usp=drive_link
Melakukan mitigasi aplikasi e-SAJI untuk mendukung pelayanan yang lebih baik	Telah dilakukan mitigasi aplikasi e-SAJI untuk mendukung pelayanan yang lebih baik dengan bersurat kepada Pusdatin	https://drive.google.com/drive/folders/1On38U1uNQDI0rfVjK1aQ4eaQiyBOM4AA?usp=drive_link



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar	1.	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	1
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	30
3.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
4.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	2
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	88
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	87
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)	95
		12. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		13. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80
		15. Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76
		16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	7.540.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
3.	Penataan Ruang Laut	875.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	12.012.700.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025		20.627.700.000

Jakarta 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar


Getreda Melsina Hehanussa

2. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Revisi I



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Getreda Melsina Hehanussa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1.	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	1
2.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	30
3.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
4.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)	80
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	70
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	89
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		10.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Denpasar (%)	95
		12.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		13.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80
		15.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76
		16.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	7.540.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	12.012.700.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025		19.752.700.000

Jakarta,30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) DENPASAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	2

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan Ruang Laut	875.000.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025		875.000.000

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa

3. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Revisi II



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Getreda Melsina Hehanussa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1.	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	1
2.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	30
3.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
4.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)	80
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	70
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	89
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		10.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Denpasar (%)	95
		12.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		13.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80
		15.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76
		16.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	17.635.234.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	513.820.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	11.411.878.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025		29.560.932.000

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) DENPASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Getreda Melsina Hehanussa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) DENPASAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	2

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan Ruang Laut	1.495.000.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025		1.495.000.000

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa

4. Tindak Lanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
 TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

Nomor : B.3589/BPSPL.4/RC.610/XII/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Usulan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BPSPL Denpasar

31 Desember 2025

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
- di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.3744/DJPK.1/RC.610/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada BPSPL Denpasar, dan sehubungan dengan adanya penambahan anggaran PNBPN sebesar Rp11.029.054.000,- melalui Revisi DIPA TA 2025 tanggal 31 Oktober 2025. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar mengusulkan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana dokumen terlampir pada tautan sebagai berikut https://bit.ly/DRAFT_PK_BPSPLDenpasar.

Demikian disampaikan atas perhatian dan arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Balai Pengelolaan Sumber
 Daya Pesisir dan Laut Denpasar,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

A.Boby Yefry Adi Rianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



BPSPL
DENPASAR
#BijakMengelolaLaut

